

**STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI MI MA'ARIF 07 KARANGMANGU DAN MI MA'ARIF 03
GENTASARI KECAMATAN KROYA
KABUPATEN CILACAP**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)

**MUCHOLIDIN
NIM. 1423402055**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 226 /In.17/D.Ps/PP.009/10/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Mucholidin
NIM : 1423402055
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Telah disidangkan pada tanggal **27 Februari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 10 Oktober 2019
Direktur,


Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

IAIN PURWOKERTO Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Mucholidin**
NIM : 1423402055
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07
Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan
Kroya Kabupaten Cilacap

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/Penguji		10/10-2019
2	Dr. Musta'in, M.S.I NIP. 19710302 200901 1 004 Sekretaris/Penguji		10/10-2019
3	Dr. Rohmat, M. Ag., M. Pd. NIP. 19720420 200312 1 001 Pembimbing/Penguji		10/10-19
4	Dr. Subur, M. Ag. NIP. 19670307 199303 1 005 Penguji Utama		10/10 19
5	Dr. H. Najib, M. Hum NIP. 19570131 198603 1 002 Penguji Utama		10/10-19

Purwokerto, 10/10 2019
Ketua Program Studi MPI,

Dr. Rohmat, M. Ag., M. Pd.
NIP. 19720420 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa

Nama : **Mucholidin**
NIM : 1423402055
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07
Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2019
Pembimbing



Dr. Rohmat, M. Ag., M. Pd.
NIP 19720420 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A Telp.(0281) 635624 Purwokerto

PERSETUJUAN

Nama : **Mucholidin**
NIM : 1423402055
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul : Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan perbaikan, maka tesis dengan judul tersebut di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Purwokerto, 24 / 1 2019

Mengetahui

Ketua Program Studi MPI

Pembimbing

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag

NIP. 19681008 199403 1 001

Dr. Rohmat, M.Ag.M.Pd

NIP 19720420 200312 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu dan MI Ma’arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 2019

Penulis



Mucholidin

NIM. 1423402055

**STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MI MA'ARIF 07 KARANGMANGU
DAN MI MA'ARIF 03 GENTASARI KECAMATAN KROYA
KABUPATEN CILACAP**

Mucholidin
NIM. 1423402055

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk membahas tentang Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan, kiat-kiat madrasah dalam pembiayaan, dan inovasi madrasah, dan sumber-sumber dalam pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Adapun metodenya analisis deskriptif yakni menyajikan data dengan kalimat atau bahasa untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai ialah: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha-usaha pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari pada prinsipnya sama yaitu menyusun RKM/RKAM yang melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah, dengan alur persiapan, perumusan RKM, dan pengesahan RKM, mencari dana bekerjasama dengan masyarakat, membuat desain anggaran, melakukan evaluasi. Inovasi madrasah dalam pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 pada prinsipnya sama yaitu melalui rapat kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite. Inovasi terkait dengan pembiayaan salah satunya adalah mendirikan Kantin Madrasah dan Koperasi Madrasah. Adapun sumber-sumber pembiayaan MI Ma'arif 07 Karangmangu maupun di MI Ma'arif 03 Gentasari yaitu dari BOS yang berasal dari pemerintah, sumbangan wali murid pertahun berupa infak, sadakah jariah dari siswa setiap hari Jum'at, tanah wakaf berupa sawah sebesar kurang lebih 250 m², yayasan, guru PNS berupa zakat profesi, donatur tetap/tidak tetap dan masyarakat yang besarnya berbeda-beda setiap bulan.

Kata Kunci: strategi, pembiayaan, pendidikan, madrasah

**EDUCATION FINANCING STRATEGY IN MI MA'ARIF 07 KARANGMANGU
AND MI MA'ARIF 03 GENTASARI KROYA DISTRICT
CILACAP REGENCY**

Mucholidin
NIM. 1423402055

ABSTRACT

This research intends to discuss on strategy of financing education in MI 07 Ma'arif Karangmangu and MI Ma'arif 03 Gentasari subdistrict Kroya Cilacap Regency. As for the purpose of this research was to description, madrasah in tips, and innovation financing madrasah, and sources in financing in MI Ma'arif 07 Karangmangu and MI Ma'arif 03 Gentasari Subdistrict Kroya Cilacap Regency. As for his descriptive analysis i.e. presenting data with a sentence or language to obtain a clear and detailed description. While the data collection techniques used are: observation, interview and documentation.

The results of this study concluded that education financing tips in MI Ma'arif 07 Karangmangu and MI Ma'arif 03 Gentasari in principle the same i.e. composing RKM/RKAM involving principals, teachers, and school Committee, Treasurer, with grooves the preparation, formulation of the RKM/RKAM, endorsement, and finding funds in collaboration with the community, create a design budget, doing the evaluation. Madrasah innovations in financing at MI Ma'arif 07 Karangmangu and MI Ma'arif 03 in principle are the same, namely through meetings of principals, teachers, treasurers, and committees. One of the innovations related to financing is establishing a Madrasah Canteen and Madrasah Cooperative. The sources of financing for MI Ma'arif 07 Karangmangu and MI Ma'arif 03 Gentasari are from BOS from the government, donations from students every year in the form of infaq, sadaqah jariyah from students every Friday, waqf land in the form of rice fields with less than more than 250 m², foundations, civil servant teachers in the form of professional zakat, permanent / non-permanent donors and people whose amounts vary each month.

Keywords: strategies, financing, madrasah, education

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. *Ta Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *Ta Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

/	Fathah	ditulis	A
/	Kasrah	ditulis	I
و	d'ammah	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah+wawu mati	Ditulis	U
	فر و ض	Ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	[^] Fathah+ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	[^] Fathah+wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'añ</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyaš</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zāwi al-furūd</i>
الشمس	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

ان مع العسر يسرا

Artinya : “Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al- Insyiroh: 6)



PERSEMBAHAN

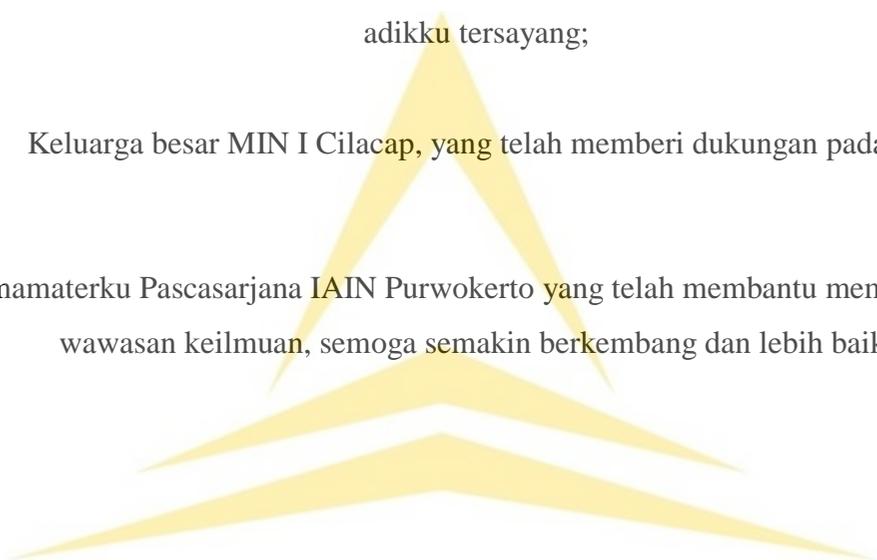
Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Keluarga kecilku: istriku “Dear” Tho Umriyah, anak-anakku Arwa Nafiisatuzzulfa, dan Qoriatuzzulfa.

Keluarga besarku: Ibu bapak, semoga aku bisa meneruskan perjuanganmu, dan adik-adikku tersayang;

Keluarga besar MIN I Cilacap, yang telah memberi dukungan padaku.

Almamaterku Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah membantu membukakan wawasan keilmuan, semoga semakin berkembang dan lebih baik.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia melalui lembaga pendidikan terbaik Islam *Dien al-Haq*.

Alhamdulillah, karya sederhana yang berjudul “Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu dan MI Ma’arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap” telah tersusun. Semoga kehadirannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak sehingga melengkapi selesainya tesis ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto;
3. Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Ketua Prodi MPI Pascasarjana IAIN Purwokerto;
4. Bapak Dr.Rohmat, M.Ag., M.Pd, Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Segenap dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan yang terbaik;
6. Bapak Ibnu Tamyiz, S.Pd, M. Pd. kepala MI Ma’arif 03 Gentasari dan seluruh guru/ karyawan, komite, dan yayasan yang telah memberikan ijin serta dukungannya;
7. Ibu Siti Nur Aliyah, S.Pd.I.,M. Pd kepala MI Ma’arif 07 Karangmangu dan seluruh guru/ karyawan, , yang telah memberikan ijin serta dukungannya;
8. Ibu Ellis Satiyawati, S.Pd., M.M. kepala MIN 1 Cilacap dan seluruh guru dan karyawan yang telah memberikan ijin dan dukungannya
9. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana MPI-D/ 2014, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini mendapat imbalan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati peneliti mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi praktisi pendidikan yang membutuhkannya.

Purwokerto, Maret 2019

Penulis



Mucholidin
NIM. 1423402055



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Direktur	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Nota Dinas	iv
Pernyataan Keaslian	v
Abstrak Bahasa Indonesia	vi
Abstrak Bahasa Inggris	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Motto	xii
Persembahan	xiii
Kata Pengantar	xiv
Daftar Isi	xvi
Daftar Gambar	xix
Daftar Tabel	xx
Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	
A. Strategi Pembiayaan Pendidikan	11
1. Pengertian Strategi Pembiayaan	11
2. Jenis Pembiayaan Pendidikan.....	27

3. Sumber-Sumber dan Penggunaan Biaya Pendidikan.....	30
4. Pembiayaan Pendidikan di Sekolah	32
5. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan	33
B. Usaha Sekolah Dalam Pembiayaan Sekolah	34
1. Pengertian Usaha sekolah dalam pembiayaan pendidikan ...	34
2. Tahapan Usaha sekolah dalam pembiayaan pendidikan	28
C. Inovasi Sekolah Mencari Sumber-Sumber Biaya Pendidikan	45
1. Pengertian Inovasi Sekolah	45
2. Inovasi Sumber Biaya Pendidikan	45
3. Kelemahan Inovasi Sumber Pembiayaan	51
D. Hasil Penelitian Terdahulu	54
E. Kerangka Berpikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	56
B. Jenis dan Pendekatan	56
C. Data dan Subjek Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	61

BAB IV STRATEGI PEMBIAYAN PENDIDIKAN DI MI MA'ARIF 07

KARANGMANGU DAN MI MA'ARIF 03 GENTASARI KECAMATAN KROYA

A. Profil MI Ma'arif 07 Karangmangu	64
B. Profil MI Ma'arif 03 Gentasari	67
1. Identitas Madrasah	67
2. Visi dan Misi Madrasah	68
3. Tujuan Pendidikan Madrasah.....	69
4. Sejarah Madrasah.....	70

C. Temuan Penelitian

1. Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu	76
a. Kiat-Kiat Pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu	76
b. Inovasi Madrasah dalam Pembiayaan Pendidikan	90
c. Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah dalam mencari	91
2. Strategi Pembiayaan di MI Ma'arif 03 Gentasari	93
a. Kiat-kiat Madrasah dalam Pembiayaan Pendidikan	93
b. Inovasi Madrasah dalam mencari sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan	102
c. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan	103

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kiat-Kiat Pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu	107
2. Inovasi Madrasah dalam Pembiayaan Pendidikan	113
3. Sumber-sumber pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu.....	114
4. Kiat-Kiat Pembiayaan di MI Ma'arif 03 Gentasari dalam pembiayaan Pendidikan	116
5. Inovasi Madrasah dalam mencari sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan	122
6. Sumber-sumber pembiayaan di MI Ma'arif 03 Gentasari ...	123

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan.....	126
B. Rekomendasi.....	127
C. Penutup	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	2.1	Sumber-Sumber Dana untuk Sekolah	30
Gambar 2.	2.2	Kerangka Berfikir	55
Gambar 3.	4.1	Alur Penyusunan RKM MI Ma'arif 07 Karangmangu	77
Gambar 4.	4.2	Alur Penyusunan RKM MI Ma'arif 03 Gentasari	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	4.1	Data Sarana dan Prasarana	72
Tabel 2.	4.2	Data Pendidik dan Kependidikan tanah	72
Tabel 3.	4.3	Data tanah wakaf.....	73
Tabel 4.	4.4	Data Keadaan Madrasah	74
Tabel 5	4.5	Personil Madrasah	74
Tabel 6	4.6	Data Peserta Didik	75
Tabel 7	4.7	Data Orang Tua Peserta Didik	75
Tabel 8	4.8	Data Lulusan	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman wawancara
- Lampiran 3 Pedoman Observasi
- Lampiran 4 Dokumen Dokumentasi
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung (foto dan dokumen)
- Lampiran 6 Profil Madrasah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Di era sekarang ini kualitas suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Kemajuan Bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia.

Mengingat manfaatnya yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu di segala bidang, maka pendidikan menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua penduduk, terutama mereka yang masih pada usia sekolah pendidikan dasar.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian dikuatkan dengan ayat 2 yang berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹ Untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas yakni manusia yang beriman, bertakwa serta memiliki akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berusaha dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan program tersebut setiap warga negara diwajibkan untuk

¹ *Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* pasal 31 ayat 1 dan 2

mengenyam pendidikan minimal lulusan SLTP, Pasal 6 (1) Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 (2) Undang-Undang Sisdiknas bahwa : “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.”²

Dalam PP No. 9 Tahun 2005 terdapat 8 standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penegelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Mutu pendidikan akan tercapai apabila 8 standar nasional pendidikan dapat terpenuhi dan diupayakan dengan baik secara menyeluruh, dengan demikian mutu pendidikan tidak dapat dicapai jika hanya mengedepankan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Sinergitas dan upaya secara simultan mutlak diperlukan, karena 8 standar nasional pendidikan merupakan satu sistem.

Salah satu program pemerintah dalam rangka pemeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program BOS yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama kali diluncurkan, yaitu pertama Rp. 235.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 450.000/anak.

Secara khusus program ini bertujuan untuk membiayai seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta; menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Kebijakan sekolah gratis ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain kenaikan *unit cost* dana BOS yang diberikan kepada sekolah juga adanya perbaikan tingkat kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, serta adanya kewajiban pemerintah daerah (provinsi dan

² Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 11

kabupaten/kota) untuk memenuhi kekurangan biaya operasional apabila dana BOS belum mencukupi sebagaimana tertuang dalam buku panduan dana BOS.

Pelaksanaan program BOS dengan kebijakan pendidikan gratis di satu sisi disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu yang bersemangat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi, di sisi lain banyak sekolah yang mengaku program BOS telah membatasi gerak langkah sekolah dalam mengembangkan program pendidikan yang bermutu karena kurang adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sementara dana BOS dirasa kurang memadai karena pada dasarnya dana BOS hanya untuk menggratiskan biaya operasional saja.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada *unit cost* tiap siswa dikalikan dengan jumlah siswa. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil.

Masalah utama dana BOS umumnya terletak pada lambatnya penyaluran, pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang transparan dan keterlambatan pelaporan serta tenaga pengelola BOS. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajemen BOS daerah. Hal lain yang juga menjadi masalah kritis dalam pelaksanaannya adalah ketentuan pembagian kewenangan dalam pembiayaan pendidikan antara pusat dan daerah, ketentuan pembagian kewenangan tidak menyebutkan jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga realisasi pembiayaan pendidikan tergantung sepenuhnya pada komitmen pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam hal ini juga ditentukan oleh

kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda serta *good will* masing-masing. Kemampuan fiskal yang tinggi tanpa dibarengi dengan niat baik (*good will and political will*) belum tentu akan melahirkan keputusan pengalokasian sejumlah anggaran untuk pendidikan di daerahnya. Hal tersebut menjadi semakin rumit dengan masalah struktur organisasi pada era otonomi. *Executing agency program* dana BOS di tingkat pusat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Kedua institusi ini tidak memiliki kewenangan dalam menginstruksikan daerah untuk melakukan pendanaan bidang pendidikan.

Biaya pendidikan di sekolah tidak hanya dari pemerintah saja. Melainkan dari sumber-sumber lain misalnya yang berasal dari wali murid ataupun masyarakat. Terbatasnya dana pemerintah dalam menyelenggaraan pendidikan menuntut sekolah untuk berupaya untuk melakukan penggalan dana untuk kelangsungan hidup sekolah. Upaya tersebut terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sekolah.

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pendidikan. Oleh karena itu penulis ingin menggali informasi dan temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi pembiayaan pendidikan di madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Di kecamatan Kroya terdapat 17 madrasah, 1 madrasah negeri dan 16 madrasah swasta. Adapun madrasah yang menjadi lokasi penelitian adalah MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Sekolah dan madrasah swasta dalam konteks pembiayaan pendidikan mendapat bagian yang kecil dari pemerintah, karena pembiayaan atau pendanaan bagi satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. MI Ma'arif 07 Karangmangu Kecamatan Kroya merupakan salah satu madrasah swasta yang ada di Kecamatan Kroya, yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami perkembangannya yang signifikan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, MI Ma'arif 07 Karangmangu Kecamatan Kroya

merupakan madrasah swasta yang sejak berdirinya mengalami perkembangan yang signifikan salah satunya dapat dilihat dari bangunan fisik sekolah yang semakin baik, ruangan kelas semakin bertambah banyak, sarana dan prasarana (saspras) yang mulai terlengkapi, dan lain-lain. Salah satu bukti keseriusan MI Ma'arif 07 Karangmangu dalam meningkatkan prestasi adalah menjadi juara I pada Kompetisi Sains Madrasah Kabupaten Cilacap tahun 2016. Hal ini tidak akan dapat terpenuhi jika tidak memiliki biaya yang memadai. Selain itu juga sebagai madrasah yang didirikan oleh yayasan, pada awal pendiriannya berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan juga mengurangi angka putus sekolah dikarenakan keterbatasan dana, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan lebih difokuskan pada usaha menggali dana dari berbagai sumber.

Di MI Ma'arif 07 Karangmangu untuk biaya pendidikan di madrasah tidak hanya bersumber dari pemerintah saja dalam hal ini adalah BOS, tetapi juga biaya yang berasal dari wali murid, wakaf desa, donatur dan masyarakat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu yaitu dana operasional madrasah tidak hanya dari BOS yang bersumber dari pemerintah, akan tetapi ada dana yang bersumber dari wali murid, donatur dan masyarakat.³ Bantuan tersebut tidak hanya berupa uang akan tetapi dalam bentuk barang.

Kendala yang dihadapi Madrasah swasta pada umumnya adalah keuangan. Banyak kegiatan-kegiatan di madrasah yang tidak bisa dibiayai dari BOS. Diantaranya pembangunan gedung kelas, pengadaan mebel, iuran bulanan untuk kegiatan madrasah tingkat kecamatan. Oleh karena itu MI Ma'arif 07 Karangmangu mempunyai strategi ataupun kiat-kiat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Dalam mencari bantuan dana ataupun pembiayaan dari wali murid atau pun masyarakat MI Maarif 07 Karangmangu mempunyai strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah meningkatkan prestasi peserta didik, kualitas guru,

³ Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu Siti Nur Aliyah,S.Pd.I, Kamis, 22 September 2016, Jam 08.30 WIB

sarana dan prasarana, pelayanan dan manajemen keuangan yang akuntabilitas. Dalam manajemen keuangan MI Maarif 07 Karangmangu dilaksanakan dengan perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Madrasah, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dalam hal pembiayaan pendidikan MI Ma'arif Karangmangu bekerja sama dengan komite madrasah dan Yayasan. Dengan keberadaan Komite dan Yayasan sangat membantu untuk kemajuan madrasah. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan gedung baru lantai 2 pada tahun 2015. Selain dari bantuan dari pemerintah juga peran dari Komite, Yayasan madrasah dan organisasi keagamaan, sehingga pembangunan gedung dapat terealisasi.

Selain di MI Ma'arif 07 Karangmangu, yang menjadi obyek penelitian ini adalah MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya. Di MI Ma'arif 03 Gentasari juga mengalami hal yang serupa dengan MI Maarif 07 Karangmangu, yaitu tentang dana untuk operasional madrasah. Madrasah harus mempunyai strategi untuk menggali dana untuk operasional madrasah. Pembiayaan di MI Ma'arif 03 Gentasari selain dari pemerintah (BOS) juga menggali dana dari anak didik yang berbentuk kotak amal, tanah pertanian (wakaf), wali peserta didik, masyarakat dan para donatur.⁴ Wali peserta didik MI Ma'arif dalam membantu madrasah tidak hanya dalam bentuk uang melainkan dapat berbentuk hasil pertanian dan barang bangunan jika ada pembangunan gedung. Hal ini dilakukan atas kesadaran masyarakat untuk mempertahankan madrasah mereka dan mendukung kegiatan di madrasah.

Dalam hal pembiayaan pendidikan, komite dan pengurus yayasan berperan aktif untuk pendanaan madrasah, baik untuk dana operasional, perawatan maupun pembangunan sarana dan prasarana madrasah.

Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi pembiayaan operasional madrasah dan untuk mengantisipasi keterlambatan BOS dari pemerintah. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya.

⁴ Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif 03 Gentasari ,Ibnu Tamyis,S.Ag Sabtu, 11 Agustus 2016, Jam 11.10 WIB

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk lebih mendalami bagaimanakah strategi pembiayaan pendidikan tersebut, khususnya pada MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Tentunya Penulis akan mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mengarah pada persoalan utamanya. Penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka peneliti akan memfokuskan pada strategi pembiayaan pendidikan tentang usaha-usaha pembiayaan, inovasi pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan sehingga pembiayaan pendidikan dapat terpenuhi dan tujuan pendidikan akan tercapai di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya. Alasannya penulis memilih dua madrasah tersebut adalah pengelolaan keuangan cukup baik jika dibandingkan dengan madrasah yang lain dan mempunyai strategi yang baik dalam penggalan dana untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik pula.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi madrasah dalam usaha-usaha pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah strategi madrasah dalam inovasi pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

3. Bagaimanakah strategi madrasah dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan strategi madrasah dalam usaha-usaha pembiayaan pendidikan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Mendiskripsikan strategi madrasah dalam inovasi pembiayaan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
3. Mendiskripsikan strategi madrasah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama peran dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan sumbangan ilmiah bagi kajian lebih lanjut mengenai strategi pembiayaan pendidikan di madrasah swasta;
 - b. Dapat dijadikan salah satu tambahan khazanah keilmuan menyangkut strategi pembiayaan pendidikan;
 - c. Dapat dijadikan rujukan dalam penerapan strategi pembiayaan pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan terkait dengan strategi pembiayaan di lembaga pendidikan.

b. Bagi Sekolah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau inspirasi dan sumbangan ilmiah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama berkaitan dengan strategi pembiayaan .

c. Bagi Kepala sekolah

Dapat dijadikan sebagai sarana introspeksi kepala sekolah, sehingga termotivasi dalam meningkatkan strategi pembiayaan pada lembaga pendidikan yang dikelolanya.

d. Bagi peneliti

Menambah wawasan tentang strategi pembiayaan di sekolah dan sebagai bahan informasi untuk mengembangkan ilmu dalam bidang manajemen pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan Masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka berisi tinjauan tentang biaya pendidikan dalam konteks administrasi pendidikan meliputi konsep administrasi pendidikan, dan konsep biaya pendidikan. konsep manajemen biaya pendidikan, jenis-jenis biaya pendidikan, sumber-sumber dan penggunaan biaya pendidikan, strategi sekolah dalam penggalan sumber pembiayaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Bab III Metode penelitian memuat tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV paparan data memuat gambaran umum lokasi penelitian, dan penyajian data penelitian yang memuat tentang strategi pembiayaan madrasah swasta data penelitian, membahas tentang analisis strategi pembiayaan madrasah swasta, bagaimana dana tersebut dialokasikan dan bagaimana dana tersebut dipergunakan atau dibelanjakan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi simpulan dari hasil penelitian, dan saran sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan.



BAB II

STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Strategi Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang⁵.

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian⁶. Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan⁷.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan.

Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa menggunakan istilah *cost*, *financial*, *expenditure*. Biaya menurut para akuntan dalam Ursy dan Hammer adalah *cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*. Kata *Cost* sinonim dengan *expense* digunakan untuk mengukur pengeluaran barang atau jasa yang di sandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan.⁸

⁵ Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), 8

⁶ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003)

⁷ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984), 59

⁸ Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 5

*The decrease in net assets as a results of the use economic sevices in the reaction of revenves of the imposition of taxes by goverment units, expense is measured by the amount of the decrease in assets of increase in liabilities related to the production and delivery of goods and the rendering of service. Expense in its broadest sense include all expired cost which are deductible from revenues.*⁹

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*Direck cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Johns, Edgar L.Morphet, dan Kern Alexsander dalam buku Manajemen Biaya Pendidikan karangan Akdon, yang menyatakan bahwa :

*Education has both private and social cost, which may be both direct and indirect, dirict cost are incurred for tuition, fees, books, room and board. In a public school, the majority of these costs are subsumed by the public treasure and thus become social costs. Indirect costs of educations are embodied in the earnings which are forgone bay all persons of working age, but forgone earning are also a cost to society, a reduction in the total productivity of the nations.*¹⁰

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.¹¹

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

⁹ Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 5

¹⁰ Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 6

¹¹ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*,(Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 4

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak „mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”¹².

Biaya menurut Mulyono adalah “sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan kepada siswa”¹³. Sedangkan pembiayaan pendidikan menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Thomas H Jones seperti yang dikutip oleh Mulyono, mengemukakan “hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan”¹⁴.

Nanang Fatah mendefinisikan biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi/pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah yang semuanya diselenggarakan dalam RAPBS¹⁵.

Menurut Bastian ada empat unsur pokok dalam definisi biaya pendidikan yakni, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, Pengorbanan tersebut untuk tujuan pendidikan Berdasarkan sumber biaya yang ada, biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan dan masyarakat.¹⁶

¹² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta:Ar-RUZZ MEDIA GROUP, 2010), hlm. 48

¹³ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2010), hlm. 77
¹⁴ *Ibid.*, hlm.77-78

¹⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 112

¹⁶ Bastian, Indra.. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. (Pertama. Yogyakarta: BPF,2001).Hlm.339

Sehingga dapat disimpulkan pengertian strategi pembiayaan pendidikan ialah tahapan atau proses sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dibelanjakan berbagai macam keperluan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan disekolah tidak akan luput dari manajemen pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh setiap sekolah. Manajemen pembiayaan pendidikan menurut Dr. Rohiat, M.Pd ialah manajemen keuangan yang terdiri dari perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban.

a. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah

Secara umum, proses manajemen keuangan sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkahlangkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif.

Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan. Perencanaan

keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan (program) satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau dianalisis pembuatan perencanaan keuangan, Garner (2004) merumuskan sikuensi perencanaan keuangan yang strategis sebagai berikut: (1) misi (*mission*); (2) tujuan jangka panjang (*goals*); (3) tujuan jangka pendek (*objectives*); (4) program, layanan, dan aktivitas (*programs, services, and activities*), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah (*site-based unit goals & objectives*); (5) target: baik *outcomes* maupun *outputs*; (6) anggaran (*budget*); dan (7) perencanaan keuangan yang strategis (*strategic financial plan*). Selanjutnya, proses penyiapan perencanaan keuangan yang strategis dapat dilihat pada gambar di bawah ini diambil dan diadopsi dari Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah, Direktorat Tenaga Kependidikan, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.¹⁷

Proses perumusan perencanaan keuangan yang strategis memerlukan kajian secara cermat tentang evaluasi diri lembaga pendidikan yang bersangkutan, visi, misi, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek lembaga pendidikan. Kemudian ditetapkan program kegiatan dan berbagai layanan yang dilaksanakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan pendek serta target yang akan dicapai baik *output* maupun *outcomes*-nya, dan disusunlah anggaran sehingga jadilah perencanaan keuangan yang strategis sesuai dengan kondisi sekolah.

¹⁷ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 98

Visi sekolah menjadi pedoman dalam pengembangan program sekolah. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah, pandangan jauh kedepan kemana sekolah akan dibawa. Visi sekolah digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah dan perumusan tujuan sekolah. Contoh rumusan visi sekolah yaitu terwujudnya siswa yang berkualitas dan lulusan yang unggul sehingga mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Bertolak dari rumusan visi sekolah selanjutnya dirumuskan misi sekolah. Misi merupakan kegiatan yang harus diemban untuk menjawab pencapaian visi yang ditetapkan. Contoh perumusan misi sekolah misalnya terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif dalam lingkungan sekolah yang aman, tertib, disiplin, bersih yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya hubungan yang harmonis antar personil di sekolah.

Selanjutnya, rumusan tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan target pencapaiannya diselaraskan dengan visi dan misi sekolah. Disamping memperhatikan program pengembangan sekolah, perencanaan keuangan sekolah juga mengacu pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kepmendiknas Nomor 056/U/2001 menyebutkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi: (1) pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktik untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar; (2) pelayanan yang bersifat penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler; (3) pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktik keterampilan serta bahan praktik laboratorium dan keterampilan; (4) pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5) penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas dan air; (6) perjalanan dinas kepala sekolah dan guru; (7) pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan Komite Sekolah, kegiatan sosial; (8) penyelenggaraan lomba

yang diikuti siswa dan atau guru; (9) pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar; dan (10) penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorarium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang pendidikan. Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut, tiap kepala sekolah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, kemudian dijadikan program kegiatan yang perlu mendapatkan dana.¹⁸

Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu tahun anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh lima tahunan. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu. Berdasarkan analisis ini diperoleh banyak kegiatan yang perlu dilakukan sekolah dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun. Untuk itu perlu diurutkan (ranking) tingkat kebutuhan kegiatan dan yang paling penting sampai kegiatan pendukung yang mungkin bisa ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya waktu, keberadaan tenaga dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa diupayakan ketersediaannya. Analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini seringkali menghasilkan apa yang dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

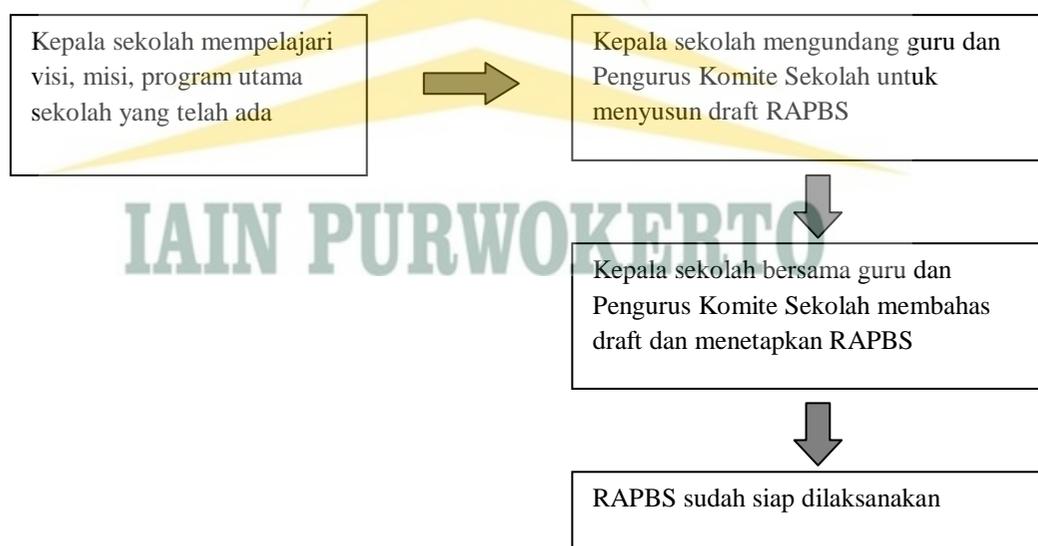
Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja

¹⁸ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal.

satu tahun. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dan berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran.

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kemudian kepala Sekolah menyetujuinya.¹⁹ Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Poses penyusunan RAPBS yang partisipatif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit cost (satuan biaya) dan volume kegiatan. Setiap program dan

¹⁹ Muh. Hizbul Muflihini, *Administrasi Pendidikan: Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2012) hal. 265

penganggarannya perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Misalnya untuk anggaran rutin, SBP (Sumbangan Biaya Pendidikan), BKM (Bantuan Khusus Murid), jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala Sekolah bersama guru dan pihak lain yang terlibat langsung misalnya komite sekolah diharapkan menyusun prioritas (*ranking*) penggunaan dana per-mata anggaran secara cermat.²⁰

Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu:

- 1) Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan atau pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite Sekolah;
 - 2) Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan;
 - 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan Langkah poin (1) dan (2). Kepala Sekolah membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada; dan
 - 4) Penyusunan RAPBS. Kepala Sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan setempat.
- b. Pelaksanaan pembelanjaan dan pembukuan keuangan sekolah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk

²⁰ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 105

itu tenaga yang melakukan pembukuan disyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu adanya pengelolaan sumber daya terpadu antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk dapat mengatur keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kegiatan yang semestinya mendapat prioritas pendanaan tapi tidak memperoleh anggaran.

Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Hemat dan sesuai dengan kebutuhan
- 2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana
- 3) Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, atau pesta.²¹

²¹ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 124

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diterapkan manajemen yang tertib meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan pengawasan.

c. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang Transparan

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari. Agar semuanya bisa lancar, maka setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai dengan pedoman dan penaturan yang berlaku. Oleh karena itu, salah satu tugas dari bendahara sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membawa uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan teratur.

Berdasarkan peraturan yang ada, maka kepala kantor, satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, serta orang atau badan yang menerima dan menguasai uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang dan berbagai sumber juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan, harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU, kemudian

pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, pada waktu serah terima dan pejabat lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang BKU dan BKP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib akan mudah mengetahui adanya perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dan pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap, dan *“up to date”* dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlengkapan administrasi keuangan; yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan;
- 2) RAPBS; yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, serta pejabat yang berwenang, misalnya Kepala Dinas Pendidikan setempat serta memiliki program penjabarannya sebagai acuan dalam setiap penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah; dan
- 3) Pengadministrasian keuangan; yaitu sekolah memiliki catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing. Sekolah harus memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan, serta daftar penerimaan gaji atau honor guru

dan tenaga kerja lainnya, dan laporan keuangan triwulan dan tahunan.²²

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka pada setiap lembaga pendidikan harus memiliki pengelola keuangan yang disebut Bendaharawan. Bendaharawan adalah orang yang diberi tugas penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang atau kertas berharga. Bendaharawan berkewajiban mengirimkan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukan. Bendaharawan sekolah memiliki tugas menerima, mencatat, dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala sekolah. Pengurusan kebendaharaan yang dilakukan oleh bendaharawan dalam bentuk perbuatan menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang, baik milik negara maupun milik pihak ketiga yang pengurusannya dipercayakan kepada negara.

d. Pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan sekolah

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku; (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan; dan (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

²² Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 127

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar; (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan; (b) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan; (c) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi, dan (d) pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya.

Pengawasan terdiri dari berbagai aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan anggaran menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan merupakan proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan. Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup kegiatan pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan objek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat menjadi pedoman, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif, dan menarik kesimpulan atau evaluasi.

Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990), maupun Swastha (1985) menyebutkan langkah pengawasan itu meliputi menetapkan standar, mengukur prestasi kerja, dan membetulkan penyimpangan.²³ Penetapan standar perlu dilakukan mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan, maka hal itu berarti bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi, perencanaan memiliki tingkat yang berbeda dan pimpinan tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya standar khusus. Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun

²³ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 130

penencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat atau apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Apabila terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka harus segera diperbaiki. Oleh sebab itu, setiap manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara, yang antara lain: (1) kelengkapan administrasi keuangan (DIK/DIP/DIPA, buku kas umum, buku register SPM, buku pembantu), dan (2) cara menghitung pajak, batas pembelian kena pajak, PPh, PPN.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi yang bertujuan untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan senantiasa sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan harus disesuaikan dengan (a) ketentuan atau peraturan yang berlaku, (b) kebijakan pimpinan, dan (c) kondisi setempat. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, yaitu tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Pemeriksaan kas adalah suatu tindakan membandingkan antara saldo kas, baik berupa uang tunai, kertas berharga maupun giral yang berada dalam pengurusan pemegang kas dengan tata usahanya. Petugas pemeriksaan harus mempunyai beberapa persyaratan mencakup:

- 1) Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat;
- 2) Objektivitas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi;
- 3) Keahlian, yaitu suatu kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang diakui mampu dalam teori dan praktik untuk melaksanakan tugas; dan
- 4) Kemampuan teknis, yaitu kesanggupan dan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas.²⁴

Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas umum secara bulanan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Pemeriksaan kas ini didasarkan pada buku kas umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi kas yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Adapun beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kas adalah memeriksa bukti-bukti pengeluaran dari sisa kas, apakah sama dengan sisa di buku kas umum. Sisa kas terdiri dari uang tunai, saldo di bank, surat register penutupan kas. Buku kas umum ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan kepala sekolah.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

²⁴ Rahmini dan Parno, *Manajemen Keuangan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), hal. 134

2. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga bagian besar,²⁵ yaitu:

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya personil yang meliputi:
 - 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
 - 3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Penjelasan al-Qur'an perihal manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tersirat dalam Q.S al-Ruum/ 30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ... ٤١

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ...”²⁶

Manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab menjadi *khalifah fi al-ardh*. Kekhalifahan manusia adalah bentuk dari *ta'abbud*-nya kepada Sang Khaliq. Sedangkan “*ta'abbud* adalah tugas pokok dari penciptaan manusia, sekaligus menggali, mengatur, menjaga dan memelihara alam semesta ini.”²⁷ Dari sini tampak jelas, bahwa persoalan pemanfaatan pengetahuan harus ditujukan untuk mendapat kemanfaatan pengetahuan itu

²⁵ I Wayan AS, *8 Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: Azzahra, 2010), 84.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf, 1998), 647.

²⁷ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan* (Banten: Pustaka Afa Media, 2012), 34.

sendiri. Begitu pula persoalan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, semestinya akan produktif dan bermanfaat bagi segala aspek yang secara langsung terlibat dalam dunia pendidikan apabila tangan-tangan manusia yang mengelola dan memanfaatkan amanah-Nya dengan baik akan pula menjadi bagian *ta'abbud* terhadap Allah SWT.

Manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari pembahasan jenis-jenis biaya pendidikan. Pada umumnya terdapat empat jenis biaya pendidikan, sebagai berikut:

a. Biaya langsung

Istilah lain dari biaya langsung adalah *direct cost*.²⁸ “Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa.”²⁹ Dari Supandi, Muh. Hizbul Muflihini mengemukakan definisi biaya langsung sebagai “biaya yang dikeluarkan langsung untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, seperti biaya gaji personil, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pembelian tanah dan pembangunan gedung.”³⁰

Bagi sekolah negeri, biaya langsung ini tidak menjadi masalah karena semua personil sudah berstatus PNS, sarana prasarana, tanah dan pembangunan gedung sudah difasilitasi oleh pemerintah. Namun lain halnya sekolah swasta, biaya langsung ini harus dianggarkan besar kecilnya sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Untuk biaya gaji personil yang sebagian besar masih berstatus honorer harus ada dan atau dibayar/ dikeluarkan oleh pihak orang tua/wali siswa selama anaknya masih bersekolah di lembaga tersebut. Sedangkan untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung, bisa dengan pembayaran uang gedung oleh orang tua/ wali siswa baru, atau uang pemeliharaan gedung untuk setiap tahunnya.

²⁸ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan...*, 3. Lihat juga Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 4.

²⁹ Akdon, *at. al.*, *Manajemen Pembiayaan...*, 6.

³⁰ Muh. Hizbul Muflihini, *Administrasi Pendidikan: Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013), 264.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung disebut juga *indirect cost*.³¹ “Biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa dalam belajar.”³² Lebih jelasnya biaya tidak langsung adalah “biaya yang harus dikeluarkan sekolah dan atau dibayarkan orang tua/wali siswa secara tidak langsung, sebagai implikasi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.”³³ Biaya tidak langsung misalnya pajak listrik, air, bangunan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis biaya ini memang tidak ada kaitannya dengan biaya proses pendidikan, namun secara administrasi kelembagaan memang harus dikeluarkan.

c. Biaya pribadi

Biaya pribadi disebut juga biaya privat atau *direct private cost* atau biaya personal.³⁴ “Sebenarnya biaya pribadi terkait dengan biaya sosial, di mana keduanya ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap pendidikan.”³⁵ Biaya pribadi dapat didefinisikan adalah “biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh setiap orang tua/ wali siswa kaitannya dengan kelancaran belajar anaknya, sehingga biaya ini harus ditanggung sendiri tergantung kebutuhan masing-masing.”³⁶ Selain untuk pembelian buku, seragam dan ongkos transportasi sekolah siswa, dapat juga untuk pembelian alat tulis, uang saku, dan lain-lain.

d. Biaya sosial

Istilah lain dari biaya sosial adalah *social cost*.³⁷ “Biaya sosial adalah jenis biaya yang dikeluarkan dan atau dibutuhkan oleh siswa demi kelancaran studinya.”³⁸ Biaya ini dibayarkan secara tidak langsung oleh orang tua/ wali

³¹ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan...*, 3. Lihat juga Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya...*, 4.

³² Akdon, *at. al.*, *Manajemen Pembiayaan...*, 6.

³³ Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan...*, 264.

³⁴ Akdon, *at. al.*, *Manajemen Pembiayaan...*, 32.

³⁵ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan...*, 32. Lihat juga Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya...*, 4.

³⁶ Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan...*, 264.

³⁷ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan...*, Lihat juga Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya...*, 4.

³⁸ Muh. Hizbul Muflihin, *Administrasi Pendidikan...*, 264.

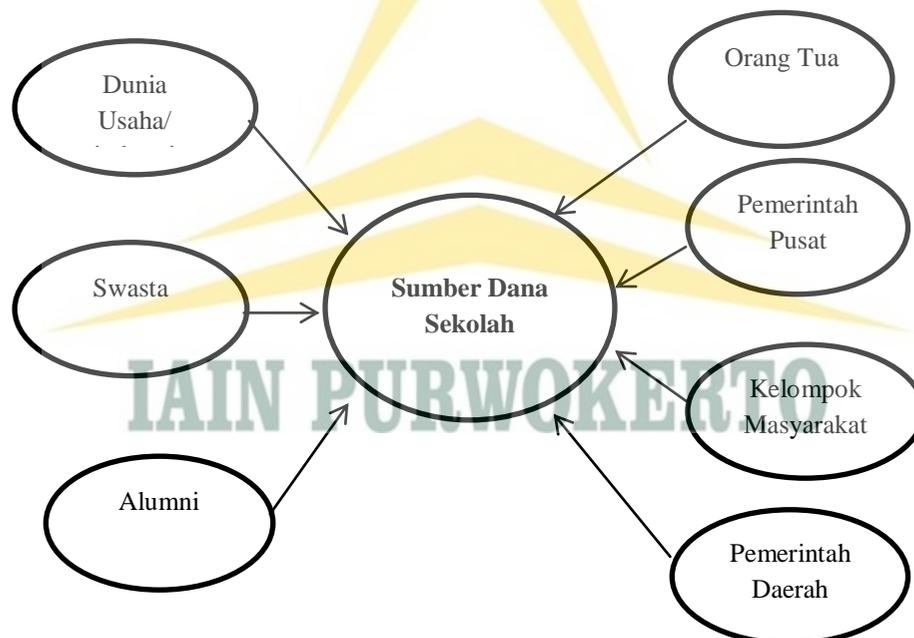
siswa melalui pihak sekolah dengan membayar pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan dana kompensasi hibah, bantuan rehabilitasi gedung, bantuan ruang kelas baru, dan lain-lain.

3. Sumber-Sumber dan Penggunaan Biaya Pendidikan

Sumber-sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu.

- a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
- b. Orang tua atau peserta didik.
- c. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.³⁹

Nanang Fattah juga mengungkapkan bahwa sumber biaya pendidikan dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, orang tua, kelompok masyarakat, dunia usaha, swasta, alumni dan lain-lain.⁴⁰



Gambar 1. 2.1. Sumber-Sumber Dana untuk Sekolah

Menurut Bambang Ismaya sumber-sumber keuangan sekolah dapat diperoleh dari lima sumber yaitu sebagai berikut:

³⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 48

⁴⁰ Nanang Fattah, *Standar Biaya Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hal 43

- a. Dana dari pemerintah, dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
- b. Dana dari orang tua siswa, Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah dengan wali siswa.
- c. Dana dari masyarakat, dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan ini merupakan wujud kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha.
- d. Dana dari alumni, bantuan dari alumni tidak selalu dalam bentuk uang misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar.
- e. dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa inggris atau ketrampilan lainnya.
- f. Dana dari kegiatan kewirausaha sekolah. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolanya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, usaha fotokopi dan lain-lain.⁴¹

Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, sekolah dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Sekolah dapat melakukan sistem akuntansi biaya yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sama halnya dengan dunia usaha, keuangan

⁴¹ Bambang Ismaya, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 141

sekolah dapat menganut prinsip-prinsip yang lazim dimulai dari *budgeting*, *accounting*, dan *auditing*. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan sekolah memerlukan kepercayaan dari masyarakat, dikelola secara transparan atau terbuka sehingga mudah diakses oleh yang membutuhkan datanya.

4. Pembiayaan pendidikan di sekolah

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46 ayat (1) yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat⁴². Pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 2 yaitu :

a. Pembiayaan pendidikan di Sekolah Swasta

Pembiayaan Pendidikan dari Swasta : Biaya pendidikan dari swasta yang dimaksud adalah biaya yang disumbangkan masyarakat (individu, perusahaan, lembaga nonpemerintah, dan lainnya) ke sekolah. Misalnya, PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya. Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat : Biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional Pendidikan (DOP).

b. Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Negeri

Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat : Menurut Undang- Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus

⁴² Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm 99.

(DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota: Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari Pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional⁴³.

5. Pengelolaan pembiayaan pendidikan

Apabila sekolah ingin mendapatkan dana dari Komite sekolah maupun masyarakat, maka sekolah harus memiliki program yang bagus sehingga mereka yang diminta dukungan dapat memberikan dukungan didasari oleh keyakinan terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan dari program yang dibuat sekolah. Dengan kata lain, sekolah dapat mengemas program dan menyakinkan pemilik dana.

Setelah para donatur memberikan bantuan yang diinginkan sekolah, maka sekolah perlu mengelola dana tersebut dengan terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat membuat sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan donatur terhadap sekolah. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan dana sekolah.

- a. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap penyimpangan dari anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
- b. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari terjadinya kecurigaan “penaikan harga” pembelian atau pengadaan barang.
- c. Hindari kesan bahwa sekolah sekedar hanya menghabiskan dana.
- d. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.

⁴³ Muhammad Anis, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran*, Skripsi hlm 17-20

- e. Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat, artinya siap dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.
- g. Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka, artinya semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.⁴⁴

B. Usaha Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian

Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kiat-kiat. Kiat-kiat menurut kamus besar bahasa Indonesia kiat diartikan sebagai “akal (seni atau cara) melakukan; taktik”⁴⁵. Kiat sekolah dalam pembiayaan pendidikan berarti cara sekolah melakukan pembiayaan pendidikan. Kiat atau cara masuk dalam wilayah manajemen atau pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen (administrasi). Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen yaitu Proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan

⁴⁴ Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 87

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line diakses di <https://kbbi.web.id/kiat-2> pada tanggal 22 November 2018 pukul 21.30 WIB

sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal⁴⁶.

Sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisa sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Maka dapat didefinisikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam pengimplementasiannya sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup tiga hal, yakni: Perencanaan biaya pendidikan, Pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan.

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan terhadap masukan dan pengeluaran sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketergantungan antara sekolah dengan masyarakat serta

⁴⁶ Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 121

lingkungannya. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup perangkat lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Hal inilah yang akan memberikan konsekuensi dalam proses transformasi sistem sesuai dengan tuntutan lingkungan terhadap keluaran⁴⁷.

Terbatasnya dana dari pemerintah dalam menyelenggaraan pendidikan, menuntut sekolah untuk berupaya melakukan penggalan dana untuk kelangsungan hidup sekolah. Upaya tersebut terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dalam penggalan biaya tersebut sekolah tentunya mempunyai banyak strategi.

Strategi pembiayaan pendidikan berasal dari tiga kata yaitu, strategi, pembiayaan dan pendidikan yang akan dibahas secara rinci oleh penulis dari sisi etimologi dan terminology.

Secara etimologis, strategi berasal dari kata majemuk bahasa Yunani “*stratos*” artinya pasukan dan ‘agen’ berarti memimpin, jadi ‘strategi’ memimpin pasukan. Maka ilmu strategi adalah ilmu tentang pasukan atau ilmu tentang perang.⁴⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁴⁹

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.⁵⁰ Mengenai konsep pembiayaan pendidikan Nanang Fattah, mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran.⁵¹ Anggaran penerimaan adalah anggaran yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sekolah umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan

⁴⁷ Mulyasa, Enco. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 76

⁴⁸ Mahfudh Shalahudin, dkk, *Metodologi Pendidikan Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) Hal. 13

⁴⁹ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Hal. 965

⁵⁰ Indra Bastian. *Akuntansi Pendidikan*. (Jakarta: Erlangga 2006). Hal. 160

⁵¹ Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002). Hal. 160

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, orangtua murid, masyarakat sekitar, dan sumber lainnya.

Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan porsi bervariasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, serta dari waktu ke waktu.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa strategi pembiayaan pendidikan adalah rencana yang cermat mengenai nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga.

Apabila sekolah ingin mendapatkan dana dari Komite sekolah maupun masyarakat, maka sekolah harus memiliki program yang bagus sehingga mereka yang diminta dukungan dapat memberikan dukungan didasari oleh keyakinan terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan dari program yang dibuat sekolah. Dengan kata lain, sekolah dapat mengemas program dan menyakinkan pemilik dana.

Setelah para donatur memberikan bantuan yang diinginkan sekolah, maka sekolah perlu mengelola dana tersebut dengan terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat membuat sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan donatur terhadap sekolah. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan dana sekolah.

- a. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap penyimpangan dari anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
- b. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari terjadinya kecurigaan “penaikan harga” pembelian atau pengadaan barang.

- c. Hindari kesan bahwa sekolah sekedar hanya menghabiskan dana.
- d. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.
- e. Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat, artinya siap dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.
- g. Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka, artinya semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.⁵²

2. Tahapan Usaha Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan

Kiat-kiat pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuantujuan dengan sarana yang optimal⁵³. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya⁵⁴.

⁵² Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 87

⁵³ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008) hlm 9-14

⁵⁴ Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:

- 1) *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif.
- 2) *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
- 3) *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.
- 4) *Keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.⁵⁵

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M).⁵⁶

Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

⁵⁵ T. Hani Handoko, MBA., *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 167.

⁵⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.⁵⁷ Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negoisasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Liphan mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis biaya yang mempengaruhi (*cost-affectiviveness*) dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang tersedia.
- 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

⁵⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 47

⁵⁸ *Ibid* ... 48

- 4) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.⁵⁹

Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana itu dihabiskan. Langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya, Menentukan program kerja dan rincian program, Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, dan Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Langkah I menyusun rencana biaya. Proses penyusunan rencana biaya dan pendanaan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan. Cara menghitung biaya satuan dengan menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar. (2) Menghitung biaya atau harga satuan yaitu dengan cara menghitung biaya satuan, menyusun rencana biaya pengembangan sekolah selama 4 tahun, menghitung perkiraan sumber pendanaan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Langkah II menyusun biaya satuan. Daftar biaya satuan dapat disusun dengan cara yaitu menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar dan menghitung biaya atau harga satuan. Untuk menghitung biaya satuan misalnya dengan menghitung jumlah orang, maka kita harus membuat analisis harga satuan per orang. Langkah III menyusun rencana biaya dan pendapatan. Rencana biaya pendapatan adalah rencana kebutuhan dana untuk setiap program dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasional. Beberapa sumber pendapatan sesuai dengan urutan tingkat kepastian perolehan dana yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Sumbangan masyarakat melalui komite sekolah belum dapat dipastikan, APBD

⁵⁹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan.....*, hlm 162

kabupaten/kota, Donatur (Perusahaan/industri, perorangan, alumni, dan sebagainya).⁶⁰ Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu :

- 1) Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite Sekolah.
 - 2) Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan.
 - 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang lengkap berdasarkan langkah poin (1) dan (2). Kepala Sekolah membuat label RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada.
 - 4) Penyusunan RAPBS. Kepala Sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.⁶¹
- b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶²

⁶⁰ Muhaimin, "Manajemen Pendidikan" Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) cet-2, h 357-372

⁶¹ Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014) hlm.35-36

⁶² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 70

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan.⁶³ Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, manfaat pembukuan kepada staf keuangan.

1) Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan terhadap biaya pendidikan ditentukan oleh besarnya biaya yang diterima oleh sekolah atau madrasah dari setiap sumber pendanaan. Sumber pembiayaan pendidikan secara umum berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan sumber-sumber lain. Sebagian besar penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan selama ini berasal dari orang tua siswa.⁶⁴ Pembukuan terhadap penerimaan atau pendapatan biaya pendidikan pada umumnya didasarkan pada prosedur pembukuan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penanggung jawab terhadap segala penerimaan/pendapatan biaya pendidikan dan juga pembukuannya dipegang sepenuhnya oleh bendahara lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala sekolah.

2) Pengeluaran Biaya Pendidikan

⁶³ Suharsini dan Lia, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), hlm. 318.

⁶⁴ Nanang Fattah, *Op Cit.* Hlm 47

Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentunya tidak menyimpang dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pengeluaran biaya pendidikan dipergunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap penerimaan/pendapatan dana, untuk pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhankebutuhan yang telah direncanakan. Pengeluaran biaya pendidikan biasanya berupa Biaya langsung dan tidak langsung. Berikut pengertian biaya langsung dan biaya tidak langsung dari teori yang berbeda. Biaya langsung ialah biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin.⁶⁵ Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orangtua dan masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung.⁶⁶

3) Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.⁶⁷ Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu:

- a) Memfokuskan evaluasi
- b) Mendesain evaluasi
- c) Mengumpulkan informasi
- d) Menganalisis informasi
- e) Melaporkan hasil evaluasi
- f) Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi.

⁶⁵ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm 168

⁶⁶ Mochammad Idhochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hlm. 144.

⁶⁷ Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda, 2010), cet. 2, hlm. 5 – 6.

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada *planning*. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.⁶⁵ Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.⁶⁸ Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan tindakan/ kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal. Evaluasi pembiayaan pendidikan sebagai pertimbangan menurut seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggung-jawabkan. Tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.⁶⁹ Konsep dasar evaluasi atau pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan yaitu dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.

C. Inovasi Sekolah Mencari Sumber-Sumber Biaya Pendidikan

1. Pengertian

Inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan”.⁷⁰ Inovasi menurut Schumpeter

⁶⁸ Hadori Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1996. Hlm 43

⁶⁹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 65

⁷⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line*, diakses di <https://kbbi.web.id/inovasi> pada tanggal 22 November 2018 pukul 22.45 WIB

memiliki arti, usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga, dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga pendidikan tapi juga Stakeholder dan masyarakat. Wina Sanjaya dalam bukunya kurikulum dan pembelajaran, inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan.⁷¹

Inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu bisa benar – benar baru, belum tercipta sebelumnya yang disebut *invention*, atau dapat juga tidak benar – benar baru sebab, sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang berbeda, kemudian dikenal dengan istilah *discovery*. Hal ini berarti inovasi sekolah mencari sumber-sumber biaya pendidikan adalah cara terbaru yang bersifat pengembangan atau pembaruan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

2. Inovasi Sumber Biaya Pendidikan

Mempertimbangkan keadaan pembiayaan pendidikan pada saat sekarang dan kemungkinan peluangnya yang akan datang, maka upaya untuk menggali sumber dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghematan belanja pendidikan terutama dengan mengatasi kelemahan struktural sistem pendanaan pemerintah dengan cara merubah sistem pendanaan Pendidikan yang lebih terbuka, tidak hanya yang berasal dari pemerintah dan orang tua tetapi juga dari masyarakat dan dunia usaha. Untuk mengatasi ketimpangan sistem pendanaan yang diperoleh dari pemerintah perlu dilakukan perubahan sistem subsidi pemerintah yang semula berdasarkan lembaga satuan Pendidikan, dirubah menjadi sistem subsidi dalam bentuk *block grant* kepada satuan Pendidikan berdasarkan satuan biaya per siswa, yang dapat dibuat gradasi berdasarkan latar belakang tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya dengan kontrak yang menuju

⁷¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran (Teoritik dan Praktik Kurikulum KTSP)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 293

kepada kinerja kelembagaan yang diukur dari peningkatan mutu pendidikan (*performance based funding sistem*).⁷² Adapun untuk meningkatkan *economics of scale* dari satuan lembaga penyelenggara pendidikan perlu dilakukan sistem pengaturan pembukaan sekolah, jurusan, dan program studi yang ketat, tidak hanya berdasarkan ketersediaan input minimal tetapi juga proyeksi pasar sampai setidaknya 10 tahun ke depan, dalam standar pelayanan minimal yang tidak hanya menyebut ukuran maksimal jumlah siswa per kelas dan per sekolah, tetapi juga jumlah minimalnya. Selain itu, perlu juga dilakukan program "*regrouping*" yang lebih fleksibel dengan berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. antar sekolah sejenjang dan sejenis;
- b. antar sekolah se-yayasan, serumpun (gugus sekolah), atau se wilayah;
- c. antar jurusan;
- d. antar beberapa program studi/spesialisasi dalam satu sekolah untuk dilebur ke dalam satu atau dua program studi saja.

Untuk melakukan program *regrouping* ini perlu didukung dengan pemetaan sekolah dan yayasan penyelenggaranya, pemetaan jurusan, program studi/spesialisasi dan pasarnya, dan studi kecenderungan tuntutan akan Pendidikan jangka panjang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bentuk pendanaan Pendidikan dari masyarakat dan dunia usaha yang sudah dilakukan secara tradisional adalah memberikan bantuan barang modal yang dapat berupa:

- a. menghibahkan tanah wakaf untuk didirikan bangunan Pendidikan dan fasilitas Pendidikan lainnya
- b. membangun sekolah, membantu rehabilitasi dan pemeliharaan sarana Pendidikan
- c. memberikan bantuan mebel dan perlengkapan dan peralatan Pendidikan seperti komputer dan lain sebagainya
- d. membantu memberikan dana untuk menggaji guru yayasan dan honorer.

Guna meningkatkan mutu, pola tradisional tersebut tidak cukup karena dibutuhkan kontribusi sumber daya pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha

⁷² Ini juga pernah diusulkan dalam Nurhadi, Muljani A dkk. *Studies on Madrasah Education Sub-Sector Assessment on Development Madrasah Aliyah Project: ADB Loan No. 1519-INO*. (Jakarta: PT Amythas Experts and Associates, 2003), hlm. 37

yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Mereview dari beberapa praktek yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, ada beberapa inovasi yang dapat dipaparkan disini. Pertama, upaya menggali sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat melalui pola subsidi silang antara kelompok masyarakat yang kaya terhadap kelompok keluarga miskin. Ada berbagai variasi yang dapat dilakukan:

- a. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan dengan menggunakan sistem progresif, dimana keluarga yang kaya membayar lebih tinggi dari keluarga yang miskin. Pola ini biasa dilakukan di sekolah swasta yang berciri khusus agama Kristen.
- b. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan yang sama pada setiap siswa, kecuali yang tidak mampu tidak dipungut biaya. Pola ini biasa diterapkan di madrasah.
- c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa dengan berbagai jalur yang mengharuskan sebagian orang tua yang kaya membayar sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) lebih banyak dari orang tua yang miskin pada waktu pendaftaran. Pola seperti ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2005 dengan menggunakan berbagai jenis sistem ujian masuk sebagaimana digambarkan pada pedoman UM-UGM tahun 2005.
- d. Memungut sumbangan pembinaan pendidikan yang lebih tinggi dari yang diperlukan di tingkat perguruan tinggi, yang hasilnya dipergunakan untuk mensubsidi penyelenggaraan Pendidikan yang lebih rendah bagi kelompok masyarakat miskin. Pola ini dikembangkan oleh Universitas Pelita Harapan yang berhasil mengumpulkan dana lebih sekitar Rp. 160 milyar per tahun dari hasil pungutan sumbangan pembinaan Pendidikan, yang kemudian dipergunakan untuk mendirikan dan membiayai operasionalisasi beberapa sekolah dasar dan menengah di daerah miskin di bawah naungan Yayasan Dian dan Lentera Harapan.
- e. melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dimana melalui kerjasama itu lembaga pendidikan dapat memperoleh tambahan sumber daya baik berupa uang, tenaga maupun fasilitas

atau campuran dari keduanya. Ada beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan.

- 1) Kerjasama dalam penelitian dan konsultasi kelembagaan dimana lembaga Pendidikan menyediakan tenaga ahlinya dan dunia usaha atau masyarakat menyediakan biaya dan upahnya. Pola ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi.
 - 2) Kerjasama dalam bentuk program dan pemberian instrukturnya dan penempatan tenaga ahli dari dunia usaha (*detasering*) secara cuma-cuma yang penyusunan program dan kurikulumnya dilakukan secara bersama-sama. Pola semacam ini banyak dilakukan oleh politeknik dan sekolah menengah kejuruan melalui program sistem ganda dalam menyelenggarakan Pendidikan vokasional yang diorganisasikan dalam Majelis Pendidikan Kejuruan. Bahkan ada beberapa bank yang memprogramkan pengabdian kepada dunia pendidikan bagi para karyawannya atas biaya bank yang bersangkutan.
 - 3) Pemberian penggunaan laboratorium hidup secara cuma-cuma untuk kepentingan praktikum mahasiswa di dunia usaha. Pola seperti ini banyak dilakukan antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit, antara SMK dengan hotel dan restoran, antara sekolah SMA dengan dunia kerja lainnya.
- f. Kerjasama dalam bentuk *Built, Operate, and Transfer (BOT)*, dimana dunia industri membantu membangun sarana dan prasarana Pendidikan dan lembaga Pendidikan menyediakan lokasi dan tanahnya. Setelah selesai dibangun digunakan dan dikelola secara bersama-sama dengan pertimbangan keuntungan tertentu, setelah selesai kontrak seluruh aset diberikan kepada lembaga Pendidikan. Pola ini sudah dilaksanakan oleh Fakultas kedokteran hewan IPB dengan dunia usaha dalam membangun unit usaha produksi unggas yang selain untuk usaha peternakan unggas yang menghasikan keuntungan, juga sekaligus difungsikan sebagai laboratorium percobaan dan praktikum bagi mahasiswa. Ketiga, menjual kepemilikan intelektual (*intellectualproperty*), yang bisa berupa keahlian maupun hak cipta kepada masyarakat untuk kepentingan lembaga pendidikan. Contohnya adalah Universitas Negeri Jakarta yang

- berhasil menjual hak ciptanya dari penyelenggaraan "sekolah laboratorium" kepada Pertamina sehingga memperoleh penghasilan dari pembelian hak cipta dan program pemberdayaannya (*capacity building*).
- g. menyelenggarakan unit produksi sebagai sarana untuk menjual jasa hasil usaha berdasarkan keahlian yang banyak dilakukan oleh politeknik dan SMK. Misalnya, SMK Negeri Kendari berhasil menjual jasa boga dan busananya melalui unit produksinya sehingga dengan omset satu bulan mencapai Rp. 40 juta. Hasil dari usaha unit produksi ini selain dapat untuk meningkatkan mutu ketrampilan siswanya juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-gurunya.
 - h. meminjam dari bank untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dengan bunga yang relatif rendah dan waktu tenggang pengembalian jangka panjang (*grace period*). Walaupun lembaga pendidikan itu bersifat nir-laba, namun pengelolaannya perlu dilakukan seperti industri (*noble industry*) agar selain efisien juga terjamin kelanjutan pembiayaannya untuk mendukung kelanjutan penyelenggaraannya. Apabila pengelolaan yang demikian dapat dilakukan, maka dunia perbankan akan dapat memberikan pinjamannya dengan bunga yang relatif murah dengan masa tenggang yang cukup lama. Bahkan sekarang *Intenational Finance Corporation* (IFC), lembaga di bawah naungan Bank Dunia, dan *Islamic Development Bank* yang biasanya hanya memberikan bantuan pinjaman komersial kepada industri sekarang telah memberikan peluang untuk memberikan pinjaman di bidang pendidikan dan kesehatan. Contoh yang menerapkan pola ini adalah Singapore International School di Jakarta.
 - i. mengembangkan Dana Pendidikan Abadi (*Endowment Fund*), diperoleh dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan dan disimpan, dan yang dipergunakan untuk membantu pendidikan adalah bunganya saja sehingga dana pendidikan yang terkumpul tetap ada untuk menjamin kelangsungan pendaan pendidikan. Pola seperti ini sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di negara maju dimana dana abadi tersebut diperoleh dari sumbangan para alumni dan dunia usaha. Dari dunia usaha misalnya dapat dilakukan dengan

menyisihkan lima persen hasil keuntungannya disumbangkan untuk Dana Pendidikan Abadi sebagai imbalan memperoleh hasil pendidikan secara gratis. Para alumni dan dunia usaha mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyumbang melalui dana abadi tersebut karena sudah diatur oleh peraturan perundangan dan memperoleh keringanan pajak sebagai insentif. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia secara diam-diam telah mengumpulkan Dana Pendidikan Abadi tersebut yang disimpan dalam bentuk deposito dan hanya bunganya yang dipergunakan untuk membiayai Pendidikan. Hal ini dilakukan secara diam-diam karena peraturan perundangan yang ada belum mendukung sistem ini. Pengumpulan Dana Pendidikan Abadi ini dapat dilakukan di tingkat satuan pendidikan, yayasan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah Pusat. Apabila dilakukan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka Dana Pendidikan Abadi ini juga dapat digunakan seiring dengan distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mensubsidi daerah Kabupaten/Kota yang tidak mampu mendanai pendidikan secara berkecukupan melalui APBD nya, sehingga mempunyai fungsi pemerataan.

3. Kelemahan inovasi sumber pembiayaan

Dari hasil pengalaman berbagai lembaga pendidikan dalam menggali sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat dan dunia industri diidentifikasi beberapa hal yang dapat menghambat upaya penggalan sumber daya tersebut.

- a. Pertama, untuk dapat menggali sumber daya pendanaan pendidikan diperlukan kepemimpinan pendidikan yang mampu mempromosikan lembaga pendidikannya, membangun jaringan kerja, dan mengelola kerja tim. Kelemahan yang sering terjadi pada umumnya adalah pimpinan satuan pendidikan tidak mempunyai kemampuan memimpin, apalagi memasarkan lembaga pendidikannya.
- b. Kedua, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam menggali dana, diperlukan keluwesan, kerja ekstra, dan kemampuan mengatur waktu. Kelemahan yang terjadi sering pimpinan

lembaga pendidikan hanyut oleh sistem birokrasi pemerintahan yang sangat kaku, lamban dan birokratik.

- c. Ketiga, terjadi kesenjangan nilai dan budaya antara lembaga pendidikan dan dunia usaha karena yang satu lebih berorientasi layanan sosial sedang yang lain lebih berorientasi kepada memperoleh keuntungan. Keempat, tidak jelasnya visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan yang akan diraih, serta strategi untuk mencapainya, dapat membuat masyarakat dan dunia usaha menjadi ragu-ragu untuk bekerjasama dan membantu. Kelima, kadang-kadang untuk menggali sumber daya pendanaan pendidikan diperlukan dana operasional yang cukup fleksibel, sayangnya dalam sistem alokasi anggaran kita lebih banyak menggunakan sistem menu (*itemized sistem*) yang lebih bersifat kaku dan membatasi.

4. Prakondisi yang Perlu Dilakukan

Menggali dan menarik sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat dan dunia usaha bukan merupakan hal yang mudah karena harus aktif, sementara secara tradisi lembaga pendidikan terbiasa memperoleh sumber daya secara pasif. Masyarakat dan dunia yang datang untuk menyalurkan dananya kepada lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dari anggota masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha. Menggali sumber daya pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu memang membutuhkan prakondisi yang memadai.

- a. Pertama, masyarakat dan dunia usaha tertarik untuk memberikan sumber daya pendanaan Pendidikan apabila yakin bahwa masyarakat dan dunia usaha merasa bahwa sumbangan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan nilai lebih. Untuk itu diperlukan kemampuan menjual (*marketing capability*). Personil lembaga pendidikan harus dikembangkan kemampuannya dalam menjual program dan produknya.
- b. Kedua, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi nilai unggul dari komponen sumber daya yang dimiliki, yang mempunyai nilai jual baik kepada masyarakat maupun dunia industri. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan tersebut perlu membangun salah satu komponen sumber dayanya yang

- mempunyai keunggulan komparatif sehingga mempunyai nilai jual yang menarik.
- c. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menyimak lingkungan (*environment scanning*). Lembaga pendidikan harus mempunyai kemampuan untuk mengamati lingkungan dan mendeteksi peluang sumber daya pendanaan pendidikan yang berpotensi untuk digali, yang dapat memberikan keuntungan bersama.
 - d. Keempat, agar supaya penggalan sumber daya pendanaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk program yang jelas melalui kontrak kerja atau kerjasama, maka diperlukan kemampuan untuk membuat proposal, kerjasama dan kontrak kerja resmi, dan perencanaan implementasinya secara rinci sehingga jelas arah dan indikator keberhasilannya. Kelima, meningkatkan kemampuan dukungan manajerial untuk mendukung dan menjaga kelangsungan keberlanjutan hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan manajerial tersebut termasuk komitmen pimpinan, struktur organisasi, fasilitas kantor, tenaga ahli, anggaran, kemampuan untuk mengatur kerjasama, dan penyelesaian administrasi yang lebih fleksibel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan menggantungkan diri dari subsidi pemerintah saja tidaklah cukup. Berbagai langkah untuk menggali sumber daya pendanaan Pendidikan baik secara internal maupun eksternal berupa inovasi dari masyarakat maupun dunia usaha perlu diusahakan. Berbagai upaya yang ditawarkan mengandung perubahan struktural maupun material dalam sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, yang harus didukung dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu melalui manajemen berbasis sekolah merupakan langkah awal yang mempermudah upaya penggalan dana pendidikan. Namun demikian kemampuan manajerial dan kepemimpinannya perlu ditingkatkan agar mampu menyisir peluang yang ada di

lingkungannya dan mengambil inisiatif untuk melakukan pemasaran dan menjual keunggulan komparatifnya⁷³.

D. Penelitian terdahulu

Selain kajian teori di atas untuk melakukan penelitian tentang strategi madrasah swasta dalam pembiayaan pendidikan peneliti juga melakukan studi literatur. Berdasarkan hasil pencarian literature yang dilakukan penulis, maka terdapat beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Firdaus Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Administrasi Pendidikan yang berjudul "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta*". Tesis ini membahas tentang proses penyusunan pembiayaan pendidikan, strategi lembaga pendidikan untuk menghimpun biaya pendidikan yang berasal dari peserta. Juga membahas tentang sistem pembiayaan yang efektif dan efisien agar dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yul Khoerudin mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto dengan judul "*Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Maarif NU 01 Petahunan dan MI Ma'arif NU 01 Krangan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*". Sistem pembiayaan dalam tesis ini masih bersifat administrasi yaitu menganalisis tentang sistem pelaksanaan pengelolaan pembiayaan yang di mulai dari perencanaan termasuk di dalamnya penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan. Dalam tesis ini juga menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat berjalannya sistem pembiayaan pendidikan.

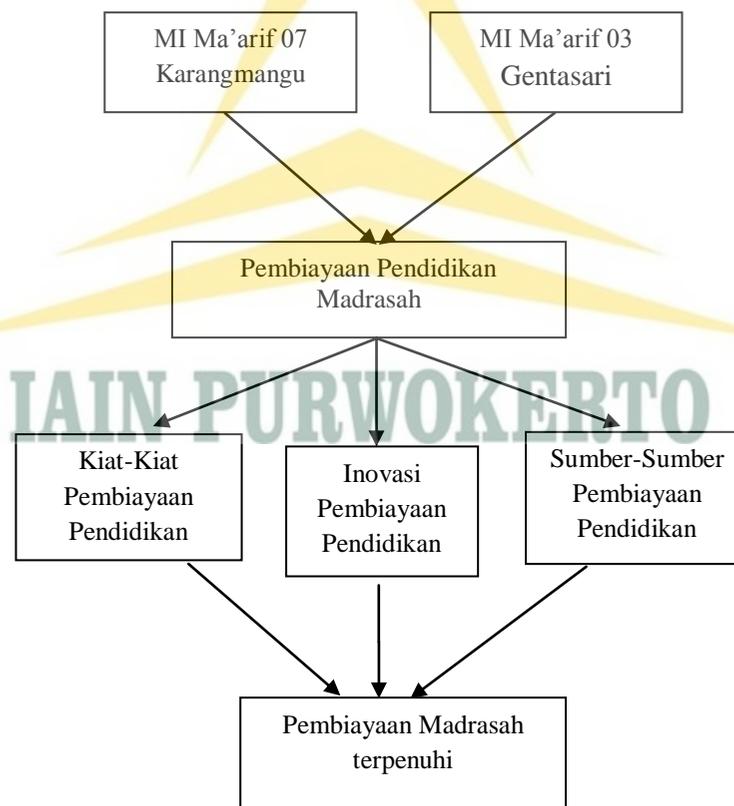
Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Ahmad Abu Bakar mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008, dengan judul Pelaksanaan Manajemen Keuangan (Studu Kasus di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran baru Jakarta Selatan), Hasil dari

⁷³ Nurhadi, *Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2005) hlm. 6-12

penelitian ini menjelaskan tentang manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh SMA Islam Al-Azhar yang sesuai dengan fungsi dan manajemen pembiayaan pendidikan dan ruang lingkup administrasi biaya pendidikan yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi anggaran pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada strategi pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan, bentuk-bentuk dan inovasi strategi pembiayaan madrasah swasta dalam pembiayaan pendidikan di MI Maarif 07 Karangmangu dan MI Maarif 03 Gentasari Kecamatan Kroya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambaran di bawah ini.



Gambar 2.2.2 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di MI Ma'arif 07 Karangmangu beralamat di Jalan Brantas II Nomor 59 Karangmangu, dan MI Ma'arif 03 Gentasari Ketiga madrasah tersebut, semuanya yang berlokasi di kecamatan Kroya, Cilacap. Alasan penulis melakukan penelitian di ketiga madrasah tersebut adalah masing-masing memiliki karakteristik yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian pendahuluan.

Berdasarkan surat permohonan ijin penelitian, maka waktu penelitian dilakukan pada tanggal 28 Juni s/d 28 Agustus 2016. Namun dengan alasan pematangan teori dan persiapan akreditasi di salah satu madrasah, maka waktu penelitian diperpanjang sampai dengan 28 Desember 2016 dengan ijin kepala madrasah masing-masing.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dintinjau dari tempatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kancha atau penelitian lapangan.⁶⁵ Penelitian ini dilakukan MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kroya, Cilacap. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan, di mana efektivitas tersebut tidak menyangkut aspek kuantitatif tetapi bagaimana proses itu berjalan. Sebagaimana pernyataan berikut, bahwa “efektivitas merupakan proses untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.”⁶⁶ Jadi, untuk mengungkap substansi penelitian ini diperlukan pengamatan mendalam dan dengan latar yang alami (*natural setting*).

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Ed. Rev. V)* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 9.

⁶⁶ Yayat Darinsyah, *Efektivitas Penggunaan...*, 2.

Dengan demikian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi pembiayaan pendidikan MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari, Kroya, Cilacap. Definisi penelitian kualitatif adalah:

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁷

Penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif apabila berhadapan dengan kenyataan ganda/ lebih. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶⁸

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif komparatif.⁶⁹ Penelitian ini mendeskripsikan keberadaan dua lembaga pendidikan dasar di bawah lingkup Kementerian Agama sekaligus dengan status dan organisasi penyelenggara yang berbeda yakni MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari, Kroya, Cilacap tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan anggaran biaya pendidikan. "Pendekatan deskriptif komparatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang dua/ lebih variabel, gejala atau keadaan."⁷⁰ Pendekatan deskriptif komparatif bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dengan membandingkan data dari tiga tempat penelitian yang berbeda.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001), 9.

⁶⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 5.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, 75.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 310.

C. Data dan Subjek Penelitian

Data penelitian mengenai semua data yang berkenaan dengan pengelolaan anggaran biaya pendidikan di ketiga madrasah tersebut, seperti profil madrasah, KTSP, RKM, RKAM, EDM, dan lainnya. Data yang pertama adalah MI Ma'arif 07 Karangmangu, dan data ke dua adalah MI Ma'arif 03 Gentasari, Kroya, Cilacap.

“Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.”⁷¹ Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian ini dengan mencari keterangan sumber data dari:

1. Kepala Madrasah

Diperoleh data tentang Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

2. Tata usaha atau Bendahara

Diperoleh data tentang RKAM dan administrasi pembiayaan madrasah.

3. Guru

Untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatannya dalam strategi pembiayaan pendidikan.

4. Komite Madrasah

Untuk mendapatkan informasi tentang keikutsertaannya dalam penyusunan RKAM dan mengawasi keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan.

5. Pengurus Yayasan, LP. Ma'arif

Untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatannya dalam pembiayaan pendidikan terutama di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari, Kroya kabupaten Cilacap.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian ...*, 122.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah “pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi”⁷² Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. Observasi

“Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.”⁷³ Observasi yang dilakukan penelitian tentang Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu dan MI Ma’arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Data yang diamati berupa KTSP, RKM, RKAM, EDM, keadaan siswa, keadaan guru, dan keadaan sarana dan prasarana. Data-data dari pengamatan ini berupa catatan lapangan. Instrumen untuk teknik ini adalah *check list*.

2. Wawancara

Wawancara adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. “Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subyek atau responden.”⁷⁴ Adapun penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Kepala Madrasah

Diperoleh data tentang pengelolaan anggaran biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan dan pengawasan pembiayaan madrasah.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 197.

⁷³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 71.

⁷⁴ Yatim Riyatno, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 67.

b. Tata usaha atau Bendahara

Diperoleh data tentang RKAM dan administrasi pembiayaan madrasah.

c. Guru

Untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatannya dalam pengelolaan pembiayaan madrasah.

d. Komite Madrasah

Untuk mendapatkan informasi tentang keikutsertaannya dalam penyusunan RKAM dan mengawasi keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan di ketiga madrasah tersebut.

e. Pengurus Yayasan, LP. Ma'arif

Untuk mendapatkan informasi tentang keterlibatannya dalam pembiayaan pendidikan terutama di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Data wawancara direkam dan dipelajari secara mendalam, lalu penulis berdiskusi dengan para guru atau informan lain yang memiliki hubungan erat dengan data-data penelitian yang ingin dikumpulkan. Selain itu juga dibuatkan pedoman wawancara (*interview guide*) sesuai kebutuhan sebagai instrumen penelitiannya.

3. Dokumentasi

“Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.”⁷⁵ Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi, visi misi, daftar guru, siswa dan karyawan, sarana dan prasarana, RAPBM serta data lain yang berupa catatan yang berhubungan dengan Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan cara membuat pedoman dokumentasi dan juga *check list* sebagai instrumennya.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, angket, dan observasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶

Proses analisis ini dilakukan sejak awal memilih dan menemukan masalah maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai menguji data. Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Milles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: “reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.”⁷⁷

1. Reduksi data

Data yang didapat dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan secara rinci. Kemudian dalam proses ini penulis dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang akan dihilangkan dan mana yang akan dipakai sebagai data penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mendapatkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penulis melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian secara akurat (*valid*).

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 249.

⁷⁷ Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Terj.), (Jakarta: UI Press, 1992), 15.

Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta selama proses pengumpulan data, penulis berusaha menganalisis serta mencari arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin dan alur sebab-akibat serta proposisi.

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif analisis MI Ma'arif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari, Kroya, Cilacap. Awalnya temuan yang diperoleh dari disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif I. Teori substantif I dianalisis dengan teori substantif I (temuan di MI Ma'arif 07 Karangmangu) dan teori substantif II (temuan di MI Ma'arif 03 Gentasari) untuk menemukan perbedaan karakteristik masing-masing obyek penelitian sebagai konsepsi teoritis berdasarkan perbedaannya. Kemudian dilakukan analisis antara teori substantif I, dan teori substantif II dengan cara yang sama. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun konsepsi sistematis berdasarkan analisis data dan interpretasi teoritis yang selanjutnya dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan teori substantif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan juga teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu di antaranya: "ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat."⁷⁸

1. Ketekunan pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara penulis mengadakan pengamatan secara teliti dan cermat, serta berkesinambungan. Dengan cara seperti ini maka kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk mendukung cara ini, penulis banyak membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka diharapkan wawasan penulis akan semakin luas dan tajam,

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 175.

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/ terpercaya atau tidak.

2. Triangulasi

Teknik ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3. Pengecekan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek hasil sementara atau hasil akhir yang didapatkan dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan diskusi akan menghasilkan masukan dalam bentuk kritik, saran, arahan, dan lain-lain sebagai bahan pertimbangan berharga bagi proses pengumpulan data selanjutnya dan analisis data sementara serta analisis data akhir.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MI MA'ARIF 07
KARANGMANGU DAN MI MA'ARIF 03 GENTASARI KECAMATAN
KROYA KABUPATEN CILACAP

A. Profil MI Ma'arif 07 Karangmangu

MI Ma'arif 07 Karangmangu beralamat di Jalan Brantas II Nomor 59 Karangmangu, Kroya, Cilacap dengan NSM: 111233010105 dan NPSN: 60710260. Jenis madrasah swasta dengan status akreditasi "A", Nomor SK: 146/BAP-SM/XI/2010 Tanggal 09 Nopember 2010. Madrasah ini berdiri pada tahun 1966 di bawah Yayasan Baitul Muttaqin An-Nur Karangmangu dan bernaung di LP. Ma'arif NU Cilacap.¹

Visi, misi, dan tujuan MI Ma'arif 07 Karangmangu dipaparkan sebagai berikut.²

Visi madrasah adalah "cerdas, berprestasi, beriman dan berakhlakul karimah", dengan indikator visi meliputi:

1. Terwujudnya generasi umat yang cerdas, yakni dapat berpikir kreatif, inovatif, obyektif, rasional serta peka dan mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ);
2. Terwujudnya generasi umat yang berprestasi, yakni unggul dalam prestasi akademik dan non akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri;
3. Terwujudnya generasi umat yang beriman, yakni mampu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
4. Terwujudnya generasi umat yang berakhlakul karimah, yakni yang mampu mencerminkan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan Misi Madrasah adalah:

¹ Dokumentasi Profil MI Ma'arif 07 Karangmangu yang dikutip pada tanggal 20 Desember 2018 .

² Dokumentasi KTSP Tahun Pelajaran 2016/ 2017 MI Ma'arif 07 Karangmangu yang dikutip pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.30 WIB..

1. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, inovatif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik;
2. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan;
3. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al Qur'an dan mengamalkannya;
4. Meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana madrasah;
5. Menumbuhkan rasa saling menghormati kepada guru, orang tua dan sesama teman.

Mengacu pada visi dan misi Madrasah, serta tujuan umum pendidikan dasar, maka tujuan pendidikan MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, MI Ma'arif 07 Karangmangu mempunyai tujuan pendidikan sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Panjang:
 - a. Pada akhir Tahun Pelajaran 2019/ 2020, sekolah mampu meraih prestasi akademik dalam perolehan rata-rata nilai UAN untuk tiga mata pelajaran yaitu Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia menjadi 9,00 dengan rata-rata NEM 27,00;
 - b. Memiliki kelompok siswa yang dapat menjuarai berbagai lomba di tingkat Provinsi;
 - c. Memiliki kelompok-kelompok seni dan tim olah raga yang berprestasi dalam ajang Porseni di tingkat Kabupaten;
 - d. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dalam rangka mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan.
2. Tujuan Jangka Menengah:

Untuk 3 tahun ke depan, tujuan yang ingin dicapai :

 - a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik tingkat Kabupaten;
 - b. Penguasaan Imtaq siswa yang berkembang;
 - c. Penambahan sarana pembelajaran yang representatif;

d. Peningkatan kualitas dan kreativitas pendidik terukur;

3. Tujuan Jangka Pendek:

Tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 1 tahun mendatang adalah:

- a. Pada akhir tahun pelajaran 2016/ 2017, sekolah mampu meraih prestasi akademik dalam perolehan rata-rata nilai UAN untuk tiga mata pelajaran yaitu Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia menjadi 8,00 dengan rata-rata NEM 24,00;
- b. Kegiatan siswa lebih mencerminkan penguasaan iman dan taqwa;
- c. Sarana pembelajaran semakin representatif;
- d. 80 % kualitas dan kreativitas dan kompetensi pendidik meningkat;
- e. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran yang variatif dan tepat sasaran;
- f. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler;
- g. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah;
- h. Meningkatkan prestasi akademik siswa di bidang seni dan olahraga lewat kejuaraan dan kompetisi.

Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I, status kepegawaian PNS. Didukung oleh 12 tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi S1 terdiri dari 11 guru kelas dan 1 guru penjas, serta 1 tenaga perpustakaan dan 1 penjaga. Keadaan siswa rata-rata per tahun ajaran 340 anak. Keadaan wali murid didominasi buruh dengan tingkat pendidikan SLTP. Prosentase lulusan rata-rata per tahun ajaran adalah 100% lulus dengan nilai yang memuaskan. Prestasi yang pernah diraih cukup banyak, yaitu 91 kejuaraan baik bidang akademik maupun non akademik, tidak hanya tingkat kecamatan saja tetapi juga tingkat kabupaten. Kejuaraan terakhir yang diraih adalah juara 1 lomba KSM tingkat kabupaten tahun 2016 dan juara 3 rata-rata UN tingkat kabupaten tahun 2016.³

Sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Kelas terdiri dari 7 ruang dengan 6 ruang dalam keadaan baik dan 1 ruang dalam keadaan rusak ringan.

³ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB.

Tahun 2016 ini, MI Ma'arif 07 Karangmangu sedang membangun ruang kelas baru dengan kondisi hampir sempurna. Perabot mebelair sudah memadai, hanya saja untuk meja kursi siswa masih kurang dikarenakan penambahan jumlah siswa. Perpustakaan dalam kondisi baik, dengan referensi buku sebanyak 1.456 buah, perabot, media pembelajaran dan perlengkapan lain dalam kondisi baik. Ruang pimpinan dan ruang guru dalam kondisi baik. Masjid 1 buah dengan ukuran 15 x 15 m dalam kondisi baik. Ruang UKS dengan perabot dan perlengkapannya dalam kondisi baik. WC siswa dan WC guru serta perlengkapannya juga dalam kondisi baik.⁴

B. Profil MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya

1. Identitas Madrasah

Nama Madrasah	: MI Ma'arif 03 Gentasari
Nomor Induk Sekolah	: 110040
Nomor Statistik Sekolah	: 11.2.33.01.08.050
Nomor Statistik Madrasah	: 11.2.33.01.
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20300949
Jenis Sekolah	: Swasta
Status	: Terakreditasi B
Nomor Surat Keputusan	: Kw.11.4/4/PP.03.2/623.1.53/2005 tanggal 18 April 2005
Pembuat surat keputusan	: Departemen Agama Kabupaten Cilacap
Tahun Pendirian	: 1960
Alamat Sekolah	: Jalan Masjid Baiturrahman No 1 Gunungnangka
Desa	: Gentasari
Kecamatan	: Kroya
Kabupaten	: Cilacap
Propinsi	: Jawa Tengah
Kode Pos	: 53282

⁴ Observasi keadaan sarana dan prasarana MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018.

2. Visi dan Misi MI Ma'arif 03 Gentasari

a. Visi

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari sebagai lembaga pendidikan dasar berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi "Terwujudnya Generasi Islam Yang Beriman, Bertaqwa Dan Unggul Dalam Prestasi". Indikator Visi:

- 1) Terwujudnya generasi Islam yang beriman, bertaqwa, yakni mampu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan mampu mencerminkan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terwujudnya generasi Islam yang Unggul, yakni dapat berpikir kreatif, inovatif, obyektif, rasional serta peka dan mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ)
- 3) Terwujudnya generasi Islam yang berprestasi, yakni prestasi akademik dan non akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri

b. Misi

- 1) Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari al Qur'an, Hadits dan menjalankan ajaran agama Islam dengan benar
- 2) Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat
- 3) Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas dalam Pencapaian Prestasi Akademik dan Non Akademik

- 4) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan
- 5) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- 6) Bekerja sama dengan tokoh masyarakat sebagai (Stake Holder) dalam mengembangkan dan memajukan madrasah.

3. Tujuan Pendidikan Madrasah

Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari adalah meletakkan dasar keimanan, akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Panjang :

- 1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan dalam rangka mempertebal keimanan dan ketaqwaan.
- 2) Pada akhir tahun pelajaran 2016 / 2017, sekolah mampu meraih prestasi akademik dalam perolehan rata-rata nilai UAN untuk tiga mata pelajaran yaitu Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia menjadi 9,00 dengan rata-rata NEM 27,00.
- 3) Memiliki kelompok siswa yang dapat menjuarai lomba Sains di tingkat Propinsi.
- 4) Memiliki kelompok-kelompok seni dan tim olahraga yang berprestasi dalam ajang Porseni di tingkat Kabupaten.

b. Tujuan Jangka Menengah :

Untuk 3 tahun kedepan, tujuan yang ingin dicapai :

- 1) Penguasaan Imtaq siswa bertambah.
- 2) Peningkatan prestasi akademik dan non akademik tingkat Kabupaten.
- 3) Penambahan sarana pembelajaran yang representatif.
- 4) Peningkatan kualitas dan kreativitas guru terukur.

c. Tujuan Jangka Pendek :

Tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 1 tahun mendatang adalah :

- 1) Kegiatan siswa lebih mencerminkan penguasaan Imtaq.
- 2) Pada akhir tahun pelajaran 2013 / 2014, sekolah mampu meraih prestasi akademik dalam perolehan rata-rata nilai UAN untuk tiga mata pelajaran yaitu Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia menjadi 8,00 dengan rata-rata NEM 24,00
- 3) Sarana pembelajaran semakin representatif.
- 4) 70 % kualitas dan kreativitas guru meningkat.
- 5) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Aktif (PAKEM, CTL).
- 6) Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler
- 7) Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah
- 8) Meningkatkan prestasi akademik siswa di bidang seni dan olahraga lewat kejuaraan dan kompetisi.

4. Sejarah Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Gentasari ini berdiri pada tahun 1960 oleh masyarakat Gunungnangka Gentasari yang diprakarsai oleh *K. Chumari*, awalnya madrasah ini bernama MIN (Madrasah Ibtidaiyyah Nahdlatut Thullab). Lokasi pada waktu berdirinya madrasah ini berada di depan Masjid Baiturrahman Gunungnangka Gentasari Rt 11 Rw 05 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Bpk Abdul Qodir

Sekretaris : Bpk Abdullah Ichsan

Bendahara : Bpk Khasan Murji

Anggota :

- a. Bpk H. Sholeh
- b. Bpk Dulah Fandi
- c. Bpk Sanmurja
- d. Bpk Achmad Sayuti
- e. Bpk Syafingi

f. Bpk Abdul Fatah

g. Bpk Munajad

Dalam perkembangan selanjutnya MIN (Madrasah Ibtidaiyyah Nahdlatut Thullab) berganti nama menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB), beberapa tahun kemudian berubah nama lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyyah Nahdlatul Ulama (MINU) karena situasi dan kondisi sosial politik saat itu menuntut untuk merubah nama, maka MINU berganti nama menjadi MI DARWATA 01 (Darut Tarbiyyah Wat Ta'lim). Kondisi ini berjalan sampai dengan tahun 2000 an awal, yang kemudian pada tanggal 29 Rajab 1426 H / 3 September 2005 MI DARWATA 01 ini berganti nama menjadi MI Ma'arif 03 Gentasari sampai yang sekarang ini.

Dalam perjalanan sejarah MI Ma'arif 03 Gentasari ini awalnya dipimpin oleh Bapak K. Chumari (1961 -19), , Bapak Misro Mustofa (19 - 19), Bapak Chadik (1978–1983), Bapak Chaeri (1983 - 1986), Bapak H. A. Tholib (1986 – 2010), dan Ibnu Tamyiz mulai tanggal 1 Oktober 2010 – sekarang.

MI Ma'arif 03 Gentasari masa kepemimpinan *H. A. Tholib*, mengalami banyak kemajuan terutama fisik bangunan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jariah tanah pada tahun 2006 dari *Bapak H. Afandi Sumeri* Bayeman Lor Gentasari dengan luas tanah 729 m dan sekaligus bersertifikat waqaf. Dengan tersedianya lahan madrasah yang cukup luas ini, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2007 MI Ma'arif 03 Gentasari mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar **Rp 250.000.000**, dengan dana tersebut dapat dialokasikan untuk perlengkapan madrasah dan juga fisik madrasah berupa 6 lokal di tanah jariah tersebut untuk persiapan lantai dua dengan menghabiskan dana **Rp 400.000.000**, termasuk swadaya masyarakat.

5. Data Sarana Prasarana

Jenis Prasarana	Jumlah Ruang	Jumlah Ruang Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kondisi Rusak	Kategori Kerusakan		
				Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	8	8	-	-	-	-
Perpustakaan	1	1	-	-	-	-

R. Lab IPA	-	-	-	-	-	-
R. Lab. Biologi	-	-	-	-	-	-
R. Lab Fisika	-	-	-	-	-	-
R. Lab Kimia	-	-	-	-	-	-
R. Lab Komputer	1	1	-	-	-	-
R. Lab Bahasa	-	-	-	-	-	-
R. Pimpinan	1	1	-	-	-	-
R. Guru	1	1	-	-	-	-
R. Tata Usaha	-	-	-	-	-	-
R. Konseling	-	-	-	-	-	-
Tempat Beribadah	1	1	-	-	-	-
R. UKS	1	1	-	-	-	-
Jamban	5	5	-	-	-	-
Gudang	1	1	-	-	-	-
R. Sirkulasi	-	-	-	-	-	-
Tempat Olahraga	1	1	-	-	-	-
R. OSIS	-	-	-	-	-	-
R. Lainnya	3	3	-	-	-	-

Tabel. 1.4.1 Data Sarana dan prasarana

6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	Keterangan	Jumlah
Pendidik		
1	Guru PNS diperbantukan	4
2	Guru Tetap Yayasan	7
3	Guru Honorer	-
4	Guru Tidak Tetap	-
Tenaga Kependidikan		
1	Penjaga	1
2	Perpustakaan	1

Tabel 2. 4.2 Data Pendidik dan Kependidikan

7. Data Tanah Wakaf Milik Madrasah:

Pewakaf	Luas	Keterangan	Jmlh
Mad Sumeri HM 1672/TW: 00013	729 m / 55 Ubin	Tanah Pekarangan	1 Bidang

Bpk K. Ilyas, Bpk Jamzuri, Pengurus HM 5161 / TW: 21	462 m / 33 Ubin	Tanah Pekarangan	1 Bidang
Bpk Siswanto HM 5163 TW: 22	348 m / 32 Ubin	Tanah Pekarangan	1 Bidang

Tabel 3. 4.3 Data Tanah Waka

8. Keadaan Madrasah :

Ruang bangunan	Jumlah	Ukuran/ Luas	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruang kelas	6	7,5 x 7,5	6	-	-
Meubel kelas					
a. Meja siswa	170	-	170	-	-
b. Kursi / bangku siswa	170	-	170	-	-
b. Almari kelas	6	-	4	2	-
c. Meja kursi guru	4	-	4	-	2
d. Papan tulis	6	-	4	2	-
e. Papan pajang	-	-	-	-	-
Ruang guru	1	7.5 x 7.5	1	-	-
a. Meja kursi Guru	9	-	7	-	2
b. Almari kaca	-	-	-	-	-
c. Almari	3	-	3	-	-
d. Komputer	3	-	1	-	2
e. Laptop	2	-	2	-	-
f. Printer	1	-	1	-	-
g. Meja kursi komputer	1	-	1	-	-
h. Meja Kursi Tamu	1	set	1	-	-
i. WC Guru	1	1,5 x 2	1		
Ruang Kepala	1	4 x 7.5	1		
a. Meja kursi Kepala	1	-	-	1	-
b. Meja kursi tamu	1	set	1	-	-
c. Almari kaca	-	-	-	-	-
d. Almari	2	-	1	-	1
e. Bendera	-	-	-	-	-
Perpustakaan	-	-	-	-	-
a. Almari perpustakaan	1	-	-	1	-
b. Meja perpustakaan	-	-	-	-	-

c. Kursi perpustakaan	-	-	-	-	-
d. Televisi	1	-	1	-	-
e. VCD/ DVD	1	-	1	-	-
f. Alat Peraga		-		-	-
Mushola/Masjid	1	20 x 15	1	-	-
UKS	1	2,5 x 1,5	1	-	-
a. Dipan UKS	-	-	-	-	-
b. Kotak UKS	-	-	-	-	-
c. Almari UKS	-	-	-	-	-
d. Alat-alat kesehatan	-	-	-	-	-
Gudang	1	2,5 x 2,5	1	-	-
Sumur / PDAM	1	-	1	-	-
WC Murid	4	1.5 x 2	4	-	-
Lapangan upacara	1	25 x 12,5	-	-	-
Buku Pegangan guru					
Buku Pegangan murid					
Buku Perpustakaan					
Drum Band	1	15 set	1	-	-

Tabel 4.4.3 Data Keadaan Madrasah

9. Personil Madrasah

NAMA/NIP	L/ P	TEMPAT TGL LHR	IJAZ AH	AGA MA	JABAT AN	MULAI DISINI
Ibnu Tamyiz	L	Bms, 14 - 8 - 1970	PGA	Islam	Kamad	01/09/20 10
Payan, A. Ma.	L	Clp, 14 05 - 1969	D2	Islam	Guru	01/07/19 89
Taufik Ansori	L	Clp, 20 - 10 - 1969	D2	Islam	Guru	01/07/19 91
Tarwiatul Faoziah, A. Ma.	P	Clp, 10 - 11 - 1979	D2	Islam	Guru	01/07/20 00
Nurbaiti Rahman, S. Sos. I.	P	Clp, 28 - 02 - 1978	S1	Islam	Guru	01/07/20 04
Istingatun Hamidah, S. Hi.	P	Clp, 21 - 08 - 1978	S1	Islam	Guru	01/04/20 07
Mohammad Fadil, S. Ag.	L	Clp, 17 - 02 - 1977	S1	Islam	Guru	13/07/20 09

Puji Hartini, S. Pd.	P	Clp, 3 - 05 - 1974	S1	Islam	Guru	01/09/2009
M. Fuadin	L	Clp, 02 - 11 - 1980	SLTA	Islam	Guru	01/07/2010
Romadlon Sapril Syahidin	L	Clp, 27 - 04 - 1989	SLTA	Islam	Guru	01/07/2010

Tabel 5.4.5 Data Personil Madrasah

10. Peserta Didik

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	I	23	15	38	
2	II	18	13	31	
3	III	19	11	30	
4	IV	13	12	25	
5	V	9	14	23	
6	VI	12	11	23	
Jumlah		94	76	170	

Tabel 6.4.6 data Peserta Didik

11. Orang Tua Peserta didik

No	Pekerjaan	Jumlah (%)	Pendidikan	Jumlah (%)
1	PNS		S2	
2	TNI/ POLRI		S1	
3	WIRASWASTA		D3	
4	TANI		D2	
5	NELAYAN	-	SLTA	
6	BURUH		SLTP	
7	DLL		SD	

Tabel 7.4.7 Data Orang Tua Peserta didik

12. Lulusan

No	TahunPelajaran	JUMLAH SISWA	Prosentase Lulusan	Rata-rata NUM	Ket.
1	2003/2004	21	100 %		
2	2004/2005	20	100 %		
3	2005/2006	18	100 %		
4	2006/2007	16	100 %		
5	2007/2008	25	100 %		
6	2008/2009	32	100 %		
7	2009/2010	25	100 %		

Tabel 8. 4.8 Data lulusan

C. Temuan Penelitian

1. Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu

a. Kiat-Kiat Pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu

Perolehan informasi terkait strategi pembiayaan pendidikan yang peneliti lakukan yaitu melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah, melalui observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan wawancara dengan pihak kepala madrasah, guru, bendahara, dan komite sekolah yaitu strategi pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu melalui penyusunan RKAM yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah.

Menurut bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu bahwa:

RKAM disusun pada awal tahun pelajaran yang melibatkan kepala madrasah, guru, komite dan bendahara dengan cara melalui rapat disertai pembahasan rencana madrasah. Proses penyusunannya sesuai dengan delapan standar yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, kemudian merancang pembiayaannya⁵.

Keterlibatan guru tidak kalah penting dalam penyusunan RKAM yaitu dengan cara mendiskusikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas⁶.

Dalam pengawasan keuangan melibatkan komite madrasah seperti yang disampaikan oleh ketua komite yaitu: melakukan pembukuan audit (dokumentasi), melakukan pengawasan tentang pelaksanaan serta pengadaan dana. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari pengadaan komite⁷.

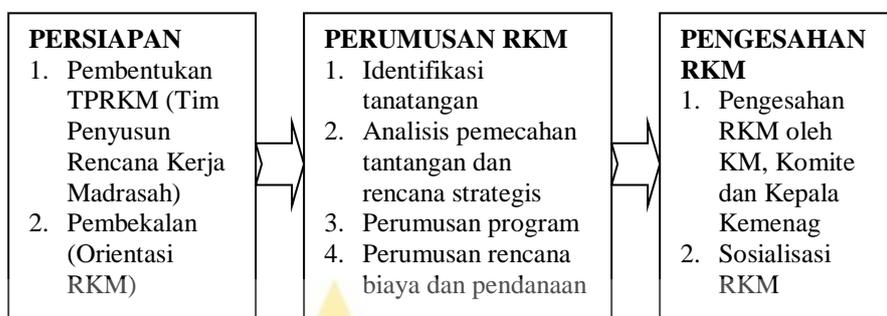
RKM biasanya diturunkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) sebagai rencana biaya dan pendanaan program/ kegiatan

⁵ Wawancara dengan Nurul Fadilah selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10.30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Martono perwakilan guru MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.30 WIB.

⁷ Wawancara dengan K.H. Abdul Kholik selaku komite MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.30 WIB.

secara rinci untuk satu tahun anggaran. Proses penyusunan RKM MI Ma'arif 07 Karangmangu dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: persiapan, perumusan RKM dan pengesahan RKM. Alur penyusunan RKM tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut⁸:



Gambar 3. 4.1 Alur Penyusunan RKM MI Ma'arif 07 Karangmangu

Pada tahap persiapan, kepala madrasah membentuk TPRKM (Tim Penyusun RKM) yang juga bertugas sebagai TPM (Tim Pengembang Madrasah), terdiri dari kepala madrasah, guru, komite, pengurus yayasan, pengawas, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa. Penetapan anggota TPRKM berdasarkan hasil pemilihan/ musyawarah mufakat, selanjutnya dibuat berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala madrasah. Tim perumus RKM terdiri dari pengurus inti, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti dibantu oleh staf pengurus, yaitu anggota yang berasal dari guru dan juga tokoh masyarakat. Anggota tim dibagi tugas sesuai dengan 8 SNP. Kemudian TPRKM ini mengikuti pembekalan mengenai kebijakan-kebijakan dan penyusunan RKM yang difasilitasi oleh kepala madrasah.

Guru dilibatkan dalam penyusunan RKM agar dapat memberikan masukan dan pengajuan kebutuhan dalam proses belajar mengajar, dan tentunya disesuaikan dengan *budget* yang ada.⁹ Bendahara (sekaligus guru yang diberi tugas tambahan) juga dilibatkan terkait administrasi dan pembiayaan. Pada penyusunan RKM/ RKAM diketahui oleh komite dan

⁸ Dokumentasi RKM Tahun 2014 s.d 2017 MI Ma'arif 07 Karangmangu dikutip pada tanggal 27 Desember 2018.

⁹ Wawancara dengan Kusinem, S.Pd.I selaku Guru MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 25 November 2016 pukul 13.30 WIB.

pengurus yayasan.¹⁰ Bentuk kepengawasan komite terhadap keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah atas dasar kepercayaan. Komite percaya bahwa pihak pengelola madrasah mampu menjalankan amanat pendidikan di segala bidang, termasuk pembiayaan. Koordinasi terjalin dengan musyawarah rutin ketika ada sesuatu hal yang perlu dipecahkan bersama.¹¹ Dalam penyusunan RKM/ RKAM juga diketahui oleh pengurus yayasan. Pengurus yayasan mempercayakan pengelolaan madrasah kepada madrasah dan komite.¹²

Selanjutnya pada tahap perumusan RKM dilakukan langkah-langkah, yakni: pertama, menganalisis kondisi madrasah dengan merumuskan kekuatan dan kelemahan MI Ma'arif 07 Karangmangu dan merumuskan rekomendasi yang tertuang dalam standar SPM dan SNP. Langkah kedua merumuskan sasaran berdasarkan skala prioritas rumusan rekomendasi yang terdapat dalam analisis kondisi madrasah dan merumuskan indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan. Langkah ketiga adalah merumuskan kegiatan dan jadwal kegiatan. Langkah keempat menyusun rencana biaya dan pendanaan.

Tahap terakhir adalah pengesahan RKM. Setelah RKM selesai disusun oleh tim, RKM dibahas bersama oleh kepala madrasah, semua guru, komite madrasah, dan pengurus yayasan. sebanyak empat kali rapat untuk dikaji ulang agar RKM yang telah disusun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya RKM diperbaiki dan disahkan oleh kepala madrasah, komite madrasah, pengurus yayasan dan kasi pendidikan madrasah. Akhirnya, RKM yang telah disahkan, disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di MI Ma'arif 07 Karangmangu, biasanya pada rapat wali murid awal tahun pelajaran.

¹⁰ Wawancara dengan Nurul Fadilah, S.Pd.I selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 3 Desember 2016 pukul 13.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan K.H. Abdul Kholik selaku Komite MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

¹² Wawancara dengan H. Mauludin, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 12.30 WIB.

Dari RKM diperoleh RKAM yang didalamnya berisi pendapatan dan belanja/ pengeluaran madrasah per tahun pelajaran. Penyusunan RAKM disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap tahunnya berbeda prioritas kebutuhannya, seperti tahun 2016 ini diprioritaskan untuk kegiatan siswa, yaitu lomba Aksioma.¹³ Dalam RKAM lebih lengkap memuat seluruh sumber pendapatan dan pembelanjaannya.

Sebagai madrasah swasta, MI Ma'arif 07 Karangmangu memang diberikan keleluasaan mencari dana di luar dana pemerintah. Kepala Madrasah berupaya untuk mencari dana atas menutupi kekurangan pembiayaan pendidikan di madrasah. Hal ini telah disampaikan oleh kepala madrasah Ma'arif 07 Karangmangu;

Dana BOS diperuntukkan untuk biaya operasional madrasah, sedangkan dana sumbangan masyarakat untuk menopang pembangunan madrasah. Dana sumbangan masyarakat berupa infaq wali murid per tahun yang dikelola oleh komite, donatur tetap/ insidental dengan tarikan per bulan, dan sumbangan dari organisasi muslimat untuk santunan anak yatim/ miskin.¹⁴

Kepengawasan pengurus yayasan desa yang sekaligus menjabat sebagai ketua MWC Ma'arif Kroya ini merupakan penghubung antara LP. Ma'arif NU Cilacap dengan madrasah terkait dengan informasi yang menyangkut proses pendidikan.¹⁵

Tugas pertama komite adalah menggugah kesadaran masyarakat dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT sehingga masyarakat sekitar dengan sukarela membantu pendanaan kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan pendidikan di madrasah. Komite menegaskan kepada para guru untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, jangan sampai ada krisis kepercayaan karena hal itu akan menghambat kemajuan madrasah. Sebaliknya, komite menjamin kepada masyarakat bahwa madrasah akan

¹³ Wawancara dengan Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu tanggal 25 November 2016 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu tanggal 25 November 2016 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan H. Mauludin, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 12.30 WIB.

memberikan bukti nyata, baik berupa fisik (bangunan, sarana prasarana) maupun non fisik (prestasi akademis/ non akademis, ibadah dan akhlak siswa). Penggalangan dana dari wali murid dengan cara infaq/ sedekah jariyah dengan batas minimal yang disepakati bersama. Untuk masyarakat sekitar bisa menyumbang dana, tenaga, konsumsi, atau bahan bangunan dalam pembangunan sarana fisik madrasah.

Komite sekaligus tokoh agama juga merangkul organisasi muslimat dan majelis ta'lim miliknya dalam mengumpulkan dana dengan kotak amal dan hasilnya akan disumbangkan ke masjid, MI, dan RA. Penggalangan dana juga diperoleh dari sisa biaya ziarah wali songo, pekan rojabiyah, khaul massal, dan khitanan massal yang dikumpulkan dan nantinya juga disumbangkan pada masjid, MI, dan RA. Tanah bagian timur madrasah adalah tanah wakaf hasil sumbangan dari masyarakat, sisanya untuk membeli sawah sebagai tanah wakaf masjid. Bantuan dari pemerintah desa juga ada, berupa wakaf sawah sebagai aset madrasah bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Madrasah pernah menerima dana bantuan RKB dari pemerintah sebesar Rp. 102.000.000,00, namun dana yang cair hanya Rp. 70.000.000,00 sehingga hal ini mendapat simpati dari masyarakat. Maka pada pembangunan RKB berupa gedung bertingkat di sebelah timur madrasah adalah hasil sumbangan masyarakat kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,00. Hal ini merupakan bukti nyata besarnya dukungan masyarakat terhadap madrasah.¹⁶

Adapun hal yang terkait pembiayaan secara langsung ke LP. Ma'arif Cilacap adalah iuran Rp. 300/ siswa/ bulan, setor naskah UAS dan UKK sebesar Rp. 9.500,00 (kelas I-III), Rp. 11.500,00 (kelas IV-VI), pembelian seragam batik siswa sebesar Rp. 24.000,00/ m dan seragam guru sebesar Rp. 35.000,00/ m, Administrasi SK guru sebesar Rp. 50.000,00/ guru, dan pembelian LKS Ke-NU-an untuk kelas IV sebesar Rp. 7.600,00/ buku, kelas V sebesar Rp. 10.100,00/ buku, dan kelas VI sebesar Rp. 8.300,00/ buku.

¹⁶ Wawancara dengan K.H. Abdul Kholik selaku Komite MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

Jika ada kelebihan dari iuran-iuran tadi, maka ada pengembalian dana ke pihak madrasah. LP. Ma'arif Cilacap juga ikut membantu penggalian sumber dana pada MI Ma'arif 07 Karangmangu dalam hal pengesahan administrasi proposal bantuan, sehingga tervalidasi dan mudah dalam prosesnya.¹⁷

Secara singkat, sumber pendapatan utama adalah dari dana BOS, dan sumber lain dari yayasan Baitul Muttaqin An-Nuur, komite dan donatur. Perolehan dana BOS sesuai dengan jumlah siswa, digunakan untuk kegiatan operasional madrasah. Dana BOS dialokasikan untuk mutu pendidikan, seperti pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pemeliharaan sarana prasarana.¹⁸ Partisipasi masyarakat sekitar sangat baik dengan mengumpulkan hasil panen setiap tahun sekali yang digunakan untuk kebutuhan madrasah, seperti tenda kemah. Adapun infaq dari wali murid dan donatur khusus untuk pengembangan sarana prasarana.¹⁹ Namun dalam hal administrasi pembiayaan tersendiri dari dana BOS karena pelaporan dan pertanggungjawabannya langsung ke masyarakat.

Dana BOS selama ini belum mencukupi banyaknya kegiatan MI Ma'arif 07 Karangmangu sehingga pihak madrasah menggali dana ke komite untuk meminta bantuan kepada wali peserta didik, guru PNS, masyarakat, dunia usaha/industri. Dana selama ini digunakan untuk pengeluaran KBM / standar proses, standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, sarana dan prasarana, diktendik, penilaian, dan SKL²⁰.

Berdasarkan kenyataan dana BOS yang tidak memenuhi seluruh pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu, sehingga perlu adanya strategi pembiayaan melalui kebijakan madrasah. Strategi khusus dalam pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu menurut ibu

¹⁷ Wawancara dengan Nur Fidiastuti selaku Staf Administrasi LP. Ma'arif Cilacap pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Nurul Fadhillah, S.Pd.I selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu tanggal 25 November 2016 pukul 09.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Nurul Fadhillah, S.Pd.I selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.

kepala sekolah yaitu melalui gerakan infak dan sedekah peserta didik dan pegawai MI setiap hari selasa dan jumat. Selain itu mencari donatur dan giat memberikan keilmuan kepada masyarakat untuk giat berinjak dan bersedekah untuk kegiatan pendidikan. Kebijakan kepala sekolah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendanaan pembiayaan pendidikan yaitu melalui infak tahunan atau uang bangunan, infak guru PNS dan sertifikasi, dan dari pinjaman BMT Ummat. Tingkat efektifitas dan efisiensi Strategi pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan yaitu MI Ma'arif 07 Karangmangu mampu melakukan strategi pembiayaan yang baik tidak mengalami pemborosan dan mampu meningkatkan sarana dan prasarana dengan melakukan pembagunan gedung dan fasilitas belajar mengajar secara berkelanjutan²¹.

Berikut disajikan data RKAM BOS MI Ma'arif 07 Karangmangu Tahun 2016/ 2017.²² Adapun anggaran pendapatan MI Ma'arif 07 Karangmangu diperoleh dari BOS pusat sebesar Rp. 259.200.000,00. Sedangkan anggaran belanja MI Ma'arif 07 Karangmangu dikeluarkan untuk program madrasah yang dikembangkan berdasarkan SNP. Anggaran belanja tersebut antara lain:

a) Pengembangan standar kompetensi lulusan

(1) Penyusunan SKL : Rp. 110.000,00

(2) Penyusunan KKM : Rp. 110.000,00

(3) Try Out Ujian Sekolah/ Madrasah

: Rp. 220.000,00

Jumlah : Rp. 440.000,00

b) Pengembangan standar isi

(1) Penyusunan pembagian tugas dan jadwal pelajaran

: Rp. 100.000,00

(2) Penyusunan program tahunan : Rp. 110.000,00

²¹ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB.

²² Dokumentasi RKAM BOS Tahun Pelajaran 2016/ 2017 MI Ma'arif 07 Karangmangu dikutip pada tanggal 20 Desember 2016.

- (3) Penyusunan program semesteran
: Rp. 220.000,00
- (4) Penyusunan silabus : Rp. 660.000,00
- (5) Penyusunan KTSP : Rp. 6.800.000,00
- Jumlah : Rp. 7.890.000,00
- c) Pengembangan standar proses
- (1) Kegiatan pengelolaan KBM : Rp. 9.740.000,00
- (2) Program kesiswaan : Rp. 6.550.000,00
- (3) Program ekstrakurikuler : Rp. 12.480.000,00
- Jumlah : Rp. 28.770.000,00
- d) Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan
- (1) Pembinaan guru : Rp. 2.100.000,00
- (2) Pembinaan tenaga kependidikan
: Rp. 400.000,00
- Jumlah : Rp. 2.500.000,00
- e) Pengembangan standar sarana dan prasarana
- (1) Pengadaan peralatan kantor/ inventaris madrasah
: Rp. 2.600.000,00
- (2) Perbaikan ringan ruang kelas : Rp. 24.000.000,00
- (3) Pengadaan mebelair : Rp. 35.700.000,00
- Jumlah : Rp. 62.300.000,00
- f) Pengembangan standar pengelolaan
- (1) Kegiatan pengelolaan perkantoran
: Rp. 2.850.000,00
- (2) Kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi
: Rp. 2.850.000,00
- (3) Kegiatan hubungan masyarakat
: Rp. 600.000,00
- (4) Pelaksanaan program BOS : Rp. 2.000.000,00
- Jumlah : Rp. 8.300.000,00
- g) Pengembangan standar pembiayaan

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| (1) Kegiatan rumah tangga madrasah | : Rp. 4.800.000,00 |
| (2) Langganan daya dan jasa | : Rp. 2.280.000,00 |
| (3) Belanja pendidik dan tenaga kependidikan | : Rp. 91.920.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 99.000.000,00 |
- h) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| (1) Penyusunan kisi-kisi UH, UTS, UAS/ UKK | : Rp. 1.100.000,00 |
| (2) Penyusunan soal UH, UTS, UAS/ UKK | : Rp. 2.400.000,00 |
| (3) Pelaksanaan dan penilaian UH, UTS, UAS/ UKK | : Rp. 36.690.000,00 |
| (4) Tindak lanjut hasil penilaian | : Rp. 9.810.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 50.000.000,00 |

Total belanja/ pengeluaran MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah sebesar Rp. 259.200.000,00.

Mekanisme penyaluran dana BOS, pertama mengusulkan rincian anggaran dana BOS. Kemudian setelah dana BOS turun, membuat berkas penyaluran untuk pencairannya. Setelah itu membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kami ke Kemenag Cilacap.

1) Desain Anggaran

Berdasarkan pada proses pembuatan anggaran di atas maka anggaran MI Ma'arif 07 Karangmangu menggunakan desain sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning Programing and Budgeting System/ PPBS* atau SP4). Dalam desain ini, anggaran disusun dengan siklus perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, di mana semua itu merupakan satu kesatuan sebagai sistem. Desain ini berorientasi

kepada mutu keluaran, di mana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program yang diusulkan.²³

Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. PPBS adalah desain anggaran yang sering dijumpai dalam pembahasan tentang manajemen pembiayaan. Di sini diterangkan bahwa PPBS adalah teknik sistem-analitik utama yang memungkinkan administrator sekolah untuk mengidentifikasi tujuan, penggambaran program untuk mencapai tujuan, menganalisis alternatif, mengalokasikan sumber daya selama periode waktu tertentu, membandingkan biaya dan efektivitas.

- 2) Efektivitas Penggunaan Anggaran
 - a) Siswa

Dilihat dari plot anggaran untuk kegiatan siswa berdasarkan pengembangan standar kompetensi kelulusan pada Tahun Pelajaran 2016/ 2017 sangatlah kecil, yakni Rp. 440.000,00. Namun dengan anggaran yang terbatas dapat efektif dan menghasilkan kegiatan siswa sebagai berikut:²⁴

- (1) Semua peserta ujian memperoleh nilai ujian sesuai kriteria kelulusan;
- (2) Semua siswa memiliki nilai raport sesuai dengan standar/ KKM untuk setiap mata pelajaran;
- (3) Pencapaian nilai rata-rata hasil ulangan siswa menunjukkan kenaikan;
- (4) 65% siswa menunjukkan peningkatan perolehan nilai tugas;

²³ Observasi RKAM Tahun Pelajaran 2016/2017 MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2016.

²⁴ Dokumentasi EDS Tahun Pelajaran 2015/2016 MI Ma'arif 07 Karangmangu yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2016.

- (5) 50% siswa memanfaatkan perpustakaan, laboratorium IPA, dan lingkungan madrasah sebagai sumber belajar dalam menyelesaikan tugas;
- (6) 40% siswa mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab;
- (7) 60% siswa mampu mengekspresikan diri dalam pecan bahasa, pentas seni-budaya;
- (8) Siswa setiap hari Senin-Kamis dan Sabtu melaksanakan shalat berjama'ah dhuhur di madrasah;
- (9) Madrasah menugaskan siswa untuk ikut membagikan zakat fitrah kepada masyarakat di lingkungan madrasah setiap bulan Ramadhan;
- (10) 70% siswa mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut;
- (11) 80% siswa berperilaku sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan mereka;
- (12) 80% siswa mematuhi norma/ aturan yang berlaku di madrasah maupun di masyarakat.

b) Guru dan staf

Dilihat dari plot anggaran untuk kegiatan guru berdasarkan pengembangan standar pembiayaan Tahun Pelajaran 2016/ 2017 pada belanja gaji pegawai cukup besar, yakni mencapai Rp. 99.000.000,00. Anggaran tersebut sudah efektif jika dilihat hasil kegiatan guru dan staf pada masa sekarang. Adapun hasil kegiatan guru dan staf MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah sebagai berikut:²⁵

- (1) Madrasah memiliki guru kelas sebanyak 12 orang;
- (2) Madrasah memiliki guru olahraga 1 orang;
- (3) Madrasah memiliki penjaga perpustakaan 1 orang;
- (4) Madrasah memiliki penjaga madrasah 1 orang;

²⁵ Dokumentasi EDS Tahun Pelajaran 2015/2016 MI Ma'arif 07 Karangmangu yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2016.

- (5) Madrasah memiliki sopir madrasah 1 orang;
- (6) Kualifikasi kepala madrasah S1 pendidikan agama;
- (7) Kualifikasi guru kelas terdiri dari 2 orang guru berpendidikan S1 dan tersertifikasi bidang Pendidikan Guru Kelas MI dan 10 orang guru berpendidikan S1 Pendidikan Guru Agama;
- (8) Kualifikasi penjaga perpustakaan berpendidikan D2 Perpustakaan dan sudah memiliki SK;
- (9) Kualifikasi penjaga madrasah berpendidikan SMA dan sudah memiliki SK;
- (10) Kompetensi kepala madrasah sudah memenuhi standar kepribadian, manajerial, kewirausahaan dan supervisi serta kompetensi sosial;
- (11) Kompetensi guru sudah memenuhi standar paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial;
- (12) Kompetensi penjaga perpustakaan sudah memenuhi standar pengelolaan informasi dan kependidikan;
- (13) Kompetensi penjaga madrasah sudah memenuhi standar kepribadian, sosial, teknis.

c) Sarana dan prasarana

Dilihat dari plot anggaran untuk sarana dan prasarana berdasarkan pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah Tahun Pelajaran 2016/ 2017, yakni Rp. 62.300.000,00. Anggaran yang cukup besar sudah efektif jika dilihat hasil sarana dan prasarana pada madrasah ini. Adapun hasil sarana dan prasarana MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah sebagai berikut:²⁶

- (1) Luas lahan 1.213 m² dan luas lantai bangunan 746 m²;
- (2) 9 ruang kelas dengan luas 451 m²;
- (3) Perpustakaan madrasah 1 ruang dengan luas 36 m²;
- (4) Laboratorium IPA 1 ruang dengan luas 12 m²;

²⁶ Dokumentasi EDM Tahun Pelajaran 2015/2016 MI Ma'arif 07 Karangmangu yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2016.

- (5) Ruang guru dengan ruang 56 m² dan ruang UKS dengan luas 10 m²;
- (6) Tempat ibadah/ masjid dengan luas 181 m²;
- (7) Tempat bermain/ olahraga dengan luas 225 m²;
- (8) Madrasah memiliki 11 rombongan belajar;
- (9) Jumlah siswa meningkat setiap tahunnya;
- (10) Madrasah memiliki alat dan sumber belajar, tiap kelas terdiri 1 papan tulis, meja dan kursi belajar dalam keadaan baik. Di ruang perpustakaan terdapat buku teks pelajaran sebanyak 2776 eksemplar terdiri dari 62 judul, buku pengayaan 1186 judul/ madrasah, buku referensi 10 judul/ madrasah, sumber belajar lain 10 judul/ madrasah. Di tempat bermain/ olahraga terdapat 1 tiang bendera, 1 bendera, lapangan bola voli, lapangan bulutangkis, len tenis meja, peralatan drumband;
- (11) Madrasah melaksanakan perbaikan/ pemeliharaan sarana dan prasarana setiap 1 tahun. Kondisi semua bangunan dalam keadaan baik;
- (12) Dari segi keamanan, madrasah memiliki pagar dan pintu gerbang yang dapat dikunci;
- (13) Dari segi kenyamanan, madrasah terhindar dari polusi, bangunan gedung memiliki sanitasi, setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembapan udara tidak melebihi kondisi di luar ruangan, madrasah dalam keadaan bersih, tertib dan indah.

Kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam kiat-kiat MI Ma'arif

07 Karangmangu dalam pembiayaan pendidikan yaitu melalui mengatur keluar masuknya dana pembiayaan.

Kegiatan mana yang harus dilakukan atau diundur terlebih dahulu akan mendukung kesetabilan dana pembiayaan. Pertimbangannya yaitu setiap kegiatan pendidikan membutuhkan biaya, sehingga perlu skala prioritas dalam melakukan kegiatan tersebut. Kelebihannya adalah kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan

peserta didik, sedangkan kekurangannya tidak setiap kegiatan pihak MI Ma'arif 07 Karangmangu dapat mengikutinya²⁷.

Kiat-kiat madrasah dalam pembiayaan pendidikan menurut guru yaitu dengan mengikutsertakan seluruh warga madrasah, komite, yayasan, wali murid dan masyarakat²⁸. Khusus untuk pihak komite sangat berperan dalam kiat-kiat pembiayaan pendidikan di madrasah swasta yaitu untuk penggalangan dana dari berbagai sumber seperti masyarakat, pengusaha, serta melakukan pembangunan sarana prasarana madrasah²⁹. Partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga seperti komite madrasah. Komite madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di madrasah.

Apabila sekolah ingin mendapatkan dana dari Komite sekolah maupun masyarakat, sekolah harus memiliki program yang bagus, sehingga mereka memberikan dukungan didasari oleh keyakinan terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan dari program yang dibuat sekolah.

Penyampai program kepada wali murid di adakan setiap tahun yaitu pada saat awal tahun pelajaran diantara program yang sudah dilaksanakan yaitu ekstrakurikuler olahraga, tahfid al-Quran juz 30, asmaul husna dan membaca al-Qur'an, program tersebut sudah berjalan dengan baik.³⁰

²⁷ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan guru Aris Martono selaku perwakilan guru MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.30 WIB

²⁹ Wawancara dengan komite Kholid MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 12.30 WIB

³⁰ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

Terbatasnya dana pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, menuntut sekolah untuk berupaya melakukan penggalan dana untuk kelangsungan hidup sekolah. Upaya terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

b. Inovasi madrasah dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan

Salah satu kompetensi kepala madrasah adalah sebagai inovator yang berguna bagi pengembangan sekolah baik itu dalam pembelajaran maupun inovasi dalam pembiayaan. Cara madrasah memperoleh inovasi dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan yaitu dengan cara melakukan rapat dengan melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite. Setelah inovasi terbentuk kepala sekolah bertugas untuk memberikan kebijakan sebagai aturan inovasi tersebut dijalankan³¹.

Menurut bendahara inovasi yang telah dilakukan di MI Ma'arif 07 Karangmangu dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan yaitu dengan mendirikan kantin, koperasi, pencarian dana kerjasama dengan Jadi Baru, Kadar Budi, Toko Mas Adil, dan dr. Eko. Tingkat keberhasilan inovasi tersebut cukup berhasil untuk memenuhi kekurangan pembiayaan pendidikan³².

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang vital dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Berkenaan dengan sekolah swasta seperti MI Ma'arif 07 Karangmangu, karena status kemandiriannya sekolah swasta tidak terlalu tergantung dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan di yayasan bersifat mandiri. Namun demikian, dukungan dana dari pemerintah tentu sangat besar artinya bagi sekolah-sekolah swasta, asal kebijakan tersebut adil dalam implementasinya.

³¹ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

³² Wawancara dengan Nurul Fadhilah, S.Pd.I selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.

Sekolah-sekolah swasta dengan segala keterbatasannya berusaha mencukupi kebutuhan operasional sekolah, mulai dari gaji, sarana-prasarana, biaya operasional hingga biaya investasi lainnya. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah seperti BOS hendaknya benar-benar mendukung kehidupan sekolah swasta, bukan mematakannya. Di luar itu semua lembaga swasta perlu berusaha keras menggali sumber dana demi kelangsungan dan perkembangan karya di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan pemberdayaan perlu dilakukan untuk tercapainya “kecukupan” dan “kelimpahan” dalam pembiayaan pendidikan.

c. Sumber-Sumber Pembiayaan di MI Ma’arif 07 Karangmangu

Sumber-sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu.

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
- 2) Orang tua atau peserta didik.
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.³³

Nanang Fattah juga mengungkapkan bahwa sumber biaya pendidikan dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, orang tua, kelompok masyarakat, dunia usaha, swasta, alumni dan lain-lain.³⁴

Di MI Ma’arif 07 Karangmangu sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah yaitu Bantuan Operasional Sekolah, Sumbangan dari wali murid, donatur, guru-guru PNS, yayasan dan dari dunia usaha. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh kepala madrasah.

Sumber-sumber pendapatan di MI Ma’arif 07 selain dari BOS juga dari sumbangan wali murid yang dikelola komite, sawah wakaf, donatur tetap, yayasan, pamal jariah setiap Jum’at, para guru PNS dan dunia usaha. Jika hanya mengandalkan dana BOS tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan madrasah apalagi untuk pemenuhan

³³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 48

³⁴ Nanang Fattah, *Standar Biaya Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hal 43

sarana dan prasarana terutama pengadaan gedung dan bangunan oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan terutama wali murid.³⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu.

BOS tidak bisa mencukupi kebutuhan madrasah perlu adanya dana yang bersumber dari masyarakat dikarenakan banyaknya guru swasta, kegiatan madrasah pemenuhan sarana dan prasarana. Apalagi sekarang sedang pembangunan gedung lantai dua. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak adanya peran serta masyarakat dalam mendukung madrasah khususnya MI Ma'arif 07 Karangmangu.³⁶

Selain berupa dana atau uang sumber pendapatan madrasah juga dari sumbangan wali murid yang berupa hasil bumi berupa beras. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Madrasah. Sumbangan wali murid tidak hanya berbentuk uang ada juga yang berbentuk hasil bertani yaitu beras sebesar kurang lebih 2 kg per murid.

Siswa MI Ma'arif 07 Karangmangu yang begitu banyak sehingga perlu adanya pengadaan gedung dan bangunan. Dalam pembangunan gedung dan sarana prasana selain dari bantuan pemerintah juga dari bantuan wali murid, yayasan maupun dari para donatur. Hal ini diungkapkan oleh komite madrasah.

Jarang sekali MI Ma'arif 07 Karangmangu mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya tahun 2015 kemarin. Itupun tidak mencukupi kebutuhan untuk pembangunan gedung apalagi untuk gedung lantai dua. Berkat sumbangan dari wali murid gedung barupun bisa berdiri kokoh. Dan sekarang sedang mendirikan gedung berlantai dua itupun bersumber dari wali murid, yayasan dan masyarakat. Memang kesadaran masyarakat terhadap madrasah dilingkungan kami sangat mendukung.³⁷

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Berkenaan dengan

³⁵ Wawancara dengan Siti Nur 'Aliyah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

³⁶ Wawancara dengan Nurul Fadilah, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 09.30 WIB

³⁷ Wawancara dengan K.H. Abdul Kholik selaku Komite MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 27 Nopember 2018 pukul 14.00 WIB.

sekolah swasta seperti MI Ma'arif 07 Karangmangu, karena status kemandiriannya sekolah swasta tidak terlalu tergantung dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan di yayasan bersifat mandiri. Namun demikian, dukungan dana dari pemerintah, dunia usaha dan pemerintah. tentu sangat besar artinya bagi sekolah-sekolah swasta, khususnya MI Ma'arif 07 Karangmangu.

2. Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari

a. Kiat-Kiat Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari

MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap memiliki strategi khusus dalam pembiayaan pendidikan yang dianggar setiap bulan sekali, selama satu (satu) tahun yaitu melalui penyusunan RKM.³⁸

Diungkapkan oleh kepala MI Ma'arif 03 Gentasari bahwa RKM disusun tiap awal Januari bekerjasama dengan kepala madrasah dan komite untuk bermusyawarah. Tim yang terlibat dalam penyusunan RKM yaitu bendahara, kepala madrasah, dewan guru, dan komite madrasah dengan tugas bendahara menyusun, kepala sekolah dan komite mengecek dan menyetujui.³⁹

Sedangkan sumber pendanaan madrasah bersumber dari BOS, Sumbangan Wali Murid, donatur dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bendahara madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari

Sumber dana dalam penyusunan RKM yaitu dari BOS yang digunakan untuk membeli buku pelajaran, PTS dan PAS, alat tulis dan lain sebagainya. Selama ini sumber dana dari BOS tidak mencukupi seluruh kegiatan madrasah, sehingga pihak madrasah menarik infak kepada walimurid melalui kartu infak⁴⁰.

Dalam penyusunan RKAM dengan guru juga dilibatkan untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan masukan terkait

³⁸ Wawancara dengan Istingatun Hamidah, S.HI selaku kepala Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 11.30 WIB.

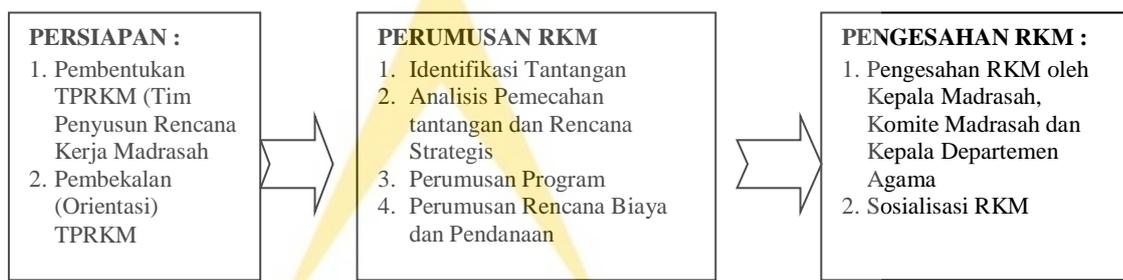
³⁹ Wawancara dengan Ibnu Tamyiz selaku kepala Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018

⁴⁰ Wawancara dengan Taufik Ansori, S.Pd.I selaku Bendahara Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 12.30 WIB.

pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan, pihak guru juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan anggaran dana pendidikan dari tiap-tiap guru⁴¹.

Pihak lain yang terlibat dalam penyusunan RKAM yaitu komite madrasah. Pihak komite bertugas untuk mengawasi keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan dengan cara melakukan pengawasan secara periodik baik itu semester maupun tahunan⁴².

Proses penyusunan RKM melalui tiga jenjang, yaitu persiapan, penyusunan RKM dan pengesahan RKM. Alur proses penyusunan RKM tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut⁴³ :



Gambar 4. 4.2 Alur Penyusunan RKM MI Ma'arif 03 Gentasari

Pada tahap persiapan, kepala madrasah membentuk TPRKM (Tim Penyusun RKM) yang juga bertugas sebagai TPM (Tim Pengembang Madrasah), terdiri dari kepala madrasah, guru, komite, pengurus yayasan, pengawas, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa. Penetapan anggota TPRKM berdasarkan hasil pemilihan/ musyawarah mufakat, selanjutnya dibuat berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala madrasah. Tim perumus RKM terdiri dari pengurus inti, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti dibantu oleh staf pengurus, yaitu anggota yang berasal dari guru dan juga tokoh masyarakat. Anggota tim dibagi tugas sesuai dengan 8 SNP. Kemudian TPRKM ini mengikuti

⁴¹ Wawancara dengan Nur Baikirohman, S.Sos.I selaku guru Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 09.15 WIB.

⁴² Wawancara dengan Kholid As Syadzali selaku Komite Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 13.15 WIB.

⁴³ Dokumentasi RKM Tahun 2014 s.d 2017 MI Ma'arif 03 Gentasari dikutip pada tanggal 28 Desember 2018.

pembekalan mengenai kebijakan-kebijakan dan penyusunan RKM yang difasilitasi oleh kepala madrasah.

Berikut disajikan data RKAM BOS MI Ma'arif 03 Gentasari Tahun 2016/ 2017.⁴⁴ Adapun anggaran pendapatan MI Ma'arif 03 Gentasari diperoleh dari BOS pusat sebesar Rp. 259.200.000,00. Sedangkan anggaran belanja MI Ma'arif 03 Gentasari dikeluarkan untuk program madrasah yang dikembangkan berdasarkan SNP. Anggaran belanja tersebut antara lain:

1) Pengembangan standar kompetensi lulusan

a) Penyusunan SKL	: Rp.	106.000,00
b) Penyusunan KKM	: Rp.	370.000,00
c) Try Out/ Ujian Sekolah	: Rp.	330.000,00
Jumlah	: Rp.	806.000,00

2) Pengembangan standar isi

a) Penyusunan pembagian tugas dan jadwal pelajaran	: Rp.	146.000,00
b) Penyusunan program semesteran	: Rp.	452.000,00
Jumlah	: Rp.	598.000,00

c) Pengembangan standar proses

(1)Kegiatan pengelolaan KBM	: Rp.	11.094.000,00
(2)Program kesiswaan	: Rp.	146.000,00
(3)Program ekstrakurikuler	: Rp.	2.720.000,00
Jumlah	: Rp.	13.960.000,00

d) Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan

(1)Pembinaan guru	: Rp.	1.000.000,00
(2)Pembinaan tenaga kependidikan	: Rp.	1.600.000,00
Jumlah	: Rp.	2.600.000,00

⁴⁴ Dokumentasi RKAM BOS Tahun Pelajaran 2018/ 2019 MI Ma'arif 03 Gentasari dikutip pada tanggal 20 Desember 2018.

- e) Pengembangan standar sarana dan prasarana
- (1) Pemeliharaan dan perbaikan gedung
: Rp. 1.520.000,00
- Jumlah : Rp. 1.520.000,00
- f) Pengembangan standar pengelolaan
- (1) Kegiatan pengelolaan perkantoran
: Rp. 5.619.400,00
- (2) Pelaksanaan program BOS : Rp. 1.200.000,00
- Jumlah : Rp. 6.819.400,00
- g) Pengembangan standar pembiayaan
- (1) Kegiatan rumah tangga madrasah
: Rp. 2.205.800,00
- (2) Langganan daya dan jasa : Rp. 4.176.400,00
- (3) Belanja pendidik dan tenaga kependidikan
: Rp. 35.880.000,00
- Jumlah : Rp. 42.262.200,00
- h) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
- (1) Penyusunan soal UH, UTS, UAS/ UKK
: Rp. 348.000,00
- (2) Pelaksanaan dan penilaian UH, UTS, UAS/ UKK
: Rp. 5.638.400,00
- (3) Pelaksanaan dan penilaian Ujian Madrasah/ UAMBN
: Rp. 856.000,00
- (4) Tindak lanjut hasil penilaian : Rp. 5.392.000,00
- Jumlah : Rp. 12.234.400,00

Total belanja/ pengeluaran MI Ma'arif 03 Gentasari dalam satu tahun anggaran adalah sebesar Rp. 80.800.000,00.

Mekanisme penyaluran dana BOS, pertama mengusulkan rincian anggaran dana BOS. Kemudian setelah dana BOS turun, membuat berkas penyaluran untuk pencairannya. Setelah itu

membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kami ke Kemenag Cilacap.

1) Desain Anggaran

Berdasarkan pada proses pembuatan anggaran di atas maka anggaran MI Ma'arif 03 Gentasari menggunakan desain sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning Programing and Budgeting System/ PPBS* atau SP4). Dalam desain ini, anggaran disusun dengan siklus perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, di mana semua itu merupakan satu kesatuan sebagai sistem. Desain ini berorientasi kepada mutu keluaran, di mana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program yang diusulkan.⁴⁵

Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. PPBS adalah desain anggaran yang sering dijumpai dalam pembahasan tentang manajemen pembiayaan. Di sini diterangkan bahwa PPBS adalah teknik sistem-analisis utama yang memungkinkan administrator sekolah untuk mengidentifikasi tujuan, penggambaran program untuk mencapai tujuan, menganalisis alternatif, mengalokasikan sumber daya selama periode waktu tertentu, membandingkan biaya dan efektivitas.

2) Efektivitas Anggaran

a) Siswa

Dilihat dari plot anggaran untuk kegiatan siswa berdasarkan pengembangan standar kompetensi kelulusan pada Tahun Pelajaran 2018/ 2019, kecil yakni Rp. 806.000,00.

⁴⁵ Observasi RKAM Tahun Pelajaran 2018/2019 MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 28 Desember 2018.

Namun dengan anggaran yang sangat terbatas dapat efektif dan menghasilkan kegiatan siswa sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Semua peserta ujian memperoleh nilai ujian sesuai kriteria kelulusan;
- (2) Semua siswa memiliki raport sesuai standar KKM untuk setiap mata pelajaran;
- (3) 75 % pencapaian prestasi akademik peserta didik mengalami kemajuan dari tahun ke tahun;
- (4) 99% peserta didik menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru;
- (5) 70% peserta didik menunjukkan peningkatan perolehan nilai tugas;
- (6) 40% peserta didik memanfaatkan perpustakaan, lingkungan madrasah sebagai sumber belajar dalam menyelesaikan tugas;
- (7) 50% peserta didik mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab;
- (8) 50% peserta didik mampu mengekspresikan diri dalam pekan bahasa, pentas seni-budaya;
- (9) Siswa kelas IV-VI setiap hari senin sampai dengan kamis melaksanakan shalat berjama'ah dhuhur di madrasah;
- (10) Seluruh siswa menghafal surat pendek al-Qur'an, do'a harian, dan Asma al-Husna;
- (11) Siswa melaksanakan infak setiap jum'at pagi;
- (12) Siswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada secara rutin;
- (13) 95% peserta didik mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang mereka anut;

⁴⁶ Dokumentasi EDS Tahun Pelajaran 2018/2019 MI Ma'arif 03 Gentasari yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2018.

(14) 95% peserta didik berperilaku sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan mereka;

(15) 95% peserta didik mematuhi norma/ aturan yang berlaku di madrasah maupun di masyarakat.

b) Guru

Dilihat dari plot anggaran untuk kegiatan guru berdasarkan pengembangan standar pembiayaan Tahun Pelajaran 2018/ 2019 pada belanja gaji pegawai tergolong sedang, yakni mencapai Rp. 35.880.000,00. Anggaran tersebut cukup efektif jika dilihat hasil kegiatan guru dan staf pada masa sekarang. Adapun hasil kegiatan guru dan staf MI Ma'arif 03 Gentasari adalah sebagai berikut:⁴⁷

- (1) Madrasah memiliki guru kelas sebanyak 6 orang;
- (2) Madrasah memiliki guru agama sebanyak 3 orang;
- (3) 5 orang guru berpendidikan S-1 bidang pendidikan
- (4) 4 orang guru berpendidikan D2 pendidikan
- (5) Kompetensi kepala madrasah sudah memenuhi standar kepribadian, manajerial, kewirausahaan dan supervisi serta kompetensi sosial;
- (6) Kompetensi guru sudah memenuhi standar paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

c) Sarana dan Prasarana

Dilihat dari plot anggaran untuk sarana dan prasarana berdasarkan pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah Tahun Pelajaran 2018/ 2019, yakni Rp. 1.520.000,00. Anggaran yang sangat kecil dari dana BOS untuk sarana dan prasarana pada madrasah ini. Untuk sarana dan prasarana madrasah memang sebagian besar ditopang dari bantuan

⁴⁷ Dokumentasi EDS Tahun Pelajaran 2018/2019 MI Ma'arif 03 Gentasari yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2018.

masyarakat. Adapun hasil sarana dan prasarana MI Ma'arif 03 Gentasari adalah sebagai berikut:⁴⁸

- (1) Luas lahan 1.539 M² dan luas lantai bangunan 882 M²;
- (2) Madrasah memiliki 8 ruang kelas;
- (3) Madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya 900 watt;
- (4) Madrasah memiliki ruang guru dengan luas 7,5 x 7,5 M;
- (5) Madrasah memiliki kamar mandi dan WC 2 buah;
- (6) Madrasah memiliki tempat bermain/ halaman;
- (7) Madrasah memiliki bukti IMB;
- (8) Madrasah memiliki 6 rombongan belajar;
- (9) Madrasah kami memiliki alat dan sumber belajar tiap kelas
1 buah papan tulis, LCD proyektor, CD pembelajaran,
kesenian: peralatan drumband;
- (10) Madrasah memiliki musholla dan kanopi samping;
- (11) Madrasah memiliki pondasi pekarangan belakang;
- (12) Madrasah memiliki alat transportasi siswa;
- (13) Madrasah melaksanakan perbaikan/ pemeliharaan sarana
dan prasarana pada setiap 1 tahun;
- (14) Untuk keamanan, madrasah memiliki pagar dan pintu
gerbang yang dapat dikunci;
- (15) Untuk kenyamanan, lingkungan madrasah terhindar dari
polusi, bangunan gedung madrasah memiliki sanitasi, setiap
ruangan di madrasah memiliki temperatur dan kelembapan
udara yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan,
madrasah dalam keadaan bersih, tertib, rindang, dan indah;

Kiat-kiat MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui siswa, masyarakat dan kalangan usaha sudah dilakukan. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara,

⁴⁸ Dokumentasi EDM Tahun Pelajaran 2018/2019 MI Ma'arif 03 Gentasari yang dikutip pada tanggal 28 Desember 2018.

komite, guru, dan ketua yayasan. Kiat-kiat khususnya yaitu melakukan pendataan sumber-sumber dana yang potensial, agar bisa memenuhi pendidikan⁴⁹.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara Negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaan pendidikannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Pendataan sumber-sumber dana dari berbagai pihak dapat memudahkan kerja komite untuk melakukan pendekatan terhadap target sumber pembiayaan melalui proposal pembiayaan pendidikan madrasah. Kelebihan kiat-kiat MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui pendataan masyarakat yang potensial menjadi donatur tetap maupun tidak tetap yaitu memudahkan arah kerja pihak madrasah dalam mencari dana pembiayaan pendidikan.

Masyarakat potensial yang didata biasanya unit usaha yang pernah atau rutin memberikan sumbangan kepada madrasah, masyarakat yang dipandang berada dan pihak-pihak sponsor yang pernah bekerjasama dengan MI Ma'arif 03 Gentasari. Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan

⁴⁹ Wawancara dengan Nur Baikurohman, S.Sos.I guru MI Maarif 03 Gentasari pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.15.

sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi masyarakat, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

b. Inovasi madrasah dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika *performance* sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarnya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Paradigma umum pembiayaan pendidikan menekankan pada penyelesaian biaya rendah untuk meningkatkan efisiensi internal dan efisiensi eksternal sistem pendidikan pada jenjang sekolah yang berbeda.

Di era globalisasi ini pembiayaan pendidikan, khususnya bagi lembaga swasta seperti MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap harus menjadi perhatian serius demi upaya mengembangkan kualitas pendidikan. Keterbatasan biaya dari pemerintah,

perlu adanya inovasi untuk mencari sumber pembiayaan di madrasah. Seperti yang disampaikan oleh Siti Fatonah:

Diperlukan inovasi-inovasi khusus dalam penggalangan dan penggalian dana demi kelangsungan dan perkembangan lembaga swasta, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Inovasi yang telah dilakukan madrasah dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yaitu dengan cara mencari informasi terkait dana dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, maupun sumber dana dari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi warga yang dianggap mampu memberikan donatur ke madrasah atau wirausaha yang ada di lingkungan madrasah.⁵⁰

Inovasi tersebut menggunakan prinsip jemput bola, pihak madrasah melakukan pendataan pihak-pihak yang berpotensi akan memberikan donatur, selanjutnya pihak madrasah akan melakukan kunjungan dengan membawa proposal pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Langkah ini cukup berhasil dengan tingkat keberhasilan 60%⁵¹.

Kelebihan inovasi jemput bola berpotensi memperoleh sumber dana yang lebih banyak, karena madrasah aktif mencari dana pendidikan. Namun kelemahannya, pihak madrasah kurang efisien dalam mencari sumber dana, karena banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendatangi satu persatu sumber dana yang potensial. Selain itu banyak memperoleh penolakan, serta orang yang didatangi belum tentu ikhlas memberikan dananya.

- c. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Zakat, infak, sadakah dan wakaf (siswa) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika madrasah mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggunakan wali siswa sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang dibingkai dalam

⁵⁰ Wawancara dengan Siti Fatonah selaku guru MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.15 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Taufik Ansori, S.Pd.I selaku bendahara MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 13.15 WIB

pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang berkualitas bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (siswa) bisa menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini.

Sumber-sumber pembiayaan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui wali siswa, yayasan, masyarakat dan kalangan usaha sudah dilakukan. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, komite, guru, dan ketua yayasan. Kiat-kiat khususnya yaitu melakukan pendataan sumber-sumber dana yang potensial, agar bisa memenuhi pendidikan⁵².

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara Negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

⁵² Wawancara dengan Nur Baikurohman, S.Sos.I guru MI Maarif 03 Gentasari pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.15.

Pendataan sumber-sumber dana dari berbagai pihak dapat memudahkan kerja komite untuk melakukan pendekatan terhadap target sumber pembiayaan melalui proposal pembiayaan pendidikan madrasah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala MI Ma'arif 03 Gentasari yaitu. Untuk memudahkan mencari sumber-sumber pendanaan terlebih dahulu diadakan pendataan diantaranya pendataan wali murid, para donatur, masyarakat dan dunia usaha untuk memudahkan melakukan pendekatan terhadap para donatur⁵³

kiat-kiat MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui pendataan masyarakat yang potensial menjadi donatur tetap maupun tidak tetap yaitu memudahkan arah kerja pihak madrasah dalam mencari dana pembiayaan pendidikan.

Masyarakat potensial yang didata biasanya unit usaha yang pernah atau rutin memberikan sumbangan kepada madrasah, masyarakat yang dipandang berada dan pihak-pihak sponsor yang pernah bekerjasama dengan MI Ma'arif 03 Gentasari. Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi masyarakat, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Di MI Ma'arif 03 Gentasari sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah yaitu Bantuan Operasional Sekolah, Sumbangan dari wali murid,

⁵³ Wawancara dengan Ibnu Tamyiz selaku Kepala Madrasah MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 13.15 WIB.

donatur, yayasan dan dari dunia usaha. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh kepala madrasah.

Sumber-sumber pendapatan di MI Ma'arif 03 Gentasari selain dari BOS juga dari sumbangan wali murid yang dikelola komite, donatur tetap, yayasan, amal jariyah setiap Jum'at, dan dunia usaha contohnya dari Toko "Jadi Baru". Jika hanya mengandalkan dana BOS tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan madrasah apalagi untuk pemenuhan sarana dan prasarana terutama pengadaan gedung dan bangunan oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan terutama wali murid.⁵⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh bendahara MI Ma,arif 03 Gentasari.

BOS tidak bisa mencukupi kebutuhan madrasah perlu adanya dana yang bersumber dari masyarakat dikarenakan banyaknya guru swasta, kegiatan madrasah pemenuhan sarana dan prasarana. Apalagi sekarang sedang pembangunan gedung lantai dua. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak adanya peran serta masyarakat dalam mendukung madrasah khususnya MI Ma'arif 03 Gentasari. Wali murid juga ikut berperan dalam pembiayaan pendidikan hal ini dibuktikan dengan adanya sumbangan SPP yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,00. Hal ini sangat membantu sekali dalam pembiayaan di madrasah kami karena pengeluaran setiap bulan begitu banyak biaya terutama untuk honor guru dan kegiatan siswa.⁵⁵

Dalam pembangunan gedung dan sarana prasana selain dari bantuan pemerintah juga dari bantuan wali murid, yayasan maupun dari para donatur. Hal ini diungkapkan oleh komite madrasah.

Untuk membuat sarana dan prasana terutama gedung pendidikan MI Ma'arif 03 Gentasari. Mengandalkan dari sumbangan wali murid, yayasan dan dunia usaha gedung barupun bisa berdiri kokoh. Sumbangan itu bukan hanya berupa dana atau uang akan tetapi berupa material bangunan dan makanan untuk para pekerja.⁵⁶

Dalam mencari sumber-sumber pembiayaan di MI Ma'arif 03 Gentasari juga melibatkan peran dari guru yaitu mengajukan proposal ke

⁵⁴ Wawancara dengan Ibnu Tamyis, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 12.30. WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Taufik Ansori, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma'arif 03 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 09.30 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan K.H. Khalid As Syadzali selaku Komite MI Ma'arif 3 Gentasari pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.

dunia usaha yang ada di lingkungan madrasah. Seperti yang diungkapkan salah satu guru.

Guru berperan dalam mencari donatur untuk pembiayaan pendidikan di MI ini karena jika hanya mengandalkan BOS tidak mencukupi. Salah satu donatur dari dunia usaha adalah “Toko Jadi Baru Kroya” yang memberikan sumbangan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.250.000,00. Hal ini sangat membantu untuk kegiatan madrasah dan kesejahteraan guru honorer.

Selain itu juga siswa juga ikut berperan dalam pembiayaan pendidikan yaitu dengan menyisihkan sebagian uang jajan. Hal ini diungkapkan oleh kepala MI Ma’arif 03 Gentasri.

Siswa juga ikut berperan dalam dalam pembiayaan pendidikan yaitu dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp. 500,00 untuk melatih siswa untuk beramal. Hal ini dilakukan setiap hari Jum,at yang biasa kami sebut dengan “Jum’at Amal”. Meskipun hanya lima ratus rupiah ini juga sangat membantu pembiayaan di madrasah kami.⁵⁷

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Begitupun juga di MI Ma’arif 03 Gentasri, semua komponen terlibat dalam pembiayaan pendidikan untuk mencapai visi dan misi dari madrasah tersebut.

b. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kiat-Kiat pembiayaan pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu

Hasil temuan wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait strategi pembiayaan pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu yaitu:

a. Menyusun RKAM

Menyusun RKAM menjadi langkah awal dalam strategi pembiayaan pendidikan di MI Ma’arif 07 Karangmangu.

b. Penyusunannya melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah

⁵⁷ Wawancara dengan Ibnu Tamyis, S.Pd.I selaku Kepala MI Ma’arif 03 Gentasri pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 12.30. WIB

Kegiatan penyusunan RKAM melibatkan kepala madrasah, guru, bendahara, dan komite sekolah. Kepala sekolah bertugas memimpin rapat, mengarahkan, dan melakukan evaluasi kinerja RKAM tahun ajaran sebelumnya. Hal ini penting sebagai acuan perbaikan, dan pelajaran kesalahan yang telah dilakukan, sehingga tidak terulang dikemudian hari.

Guru dilibatkan dalam penyusunan RKM agar dapat memberikan masukan dan pengajuan kebutuhan dalam proses belajar mengajar, dan tentunya disesuaikan dengan *budget* yang ada. Bendahara (sekaligus guru yang diberi tugas tambahan) juga dilibatkan terkait administrasi dan pembiayaan. Pada penyusunan RKM/ RKAM diketahui oleh komite dan pengurus yayasan. Bentuk kepengawasan komite terhadap keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah atas dasar kepercayaan. Komite percaya bahwa pihak pengelola madrasah mampu menjalankan amanat pendidikan di segala bidang, termasuk pembiayaan. Koordinasi terjalin dengan musyawarah rutin ketika ada sesuatu hal yang perlu dipecahkan bersama. Dalam penyusunan RKM/ RKAM juga diketahui oleh pengurus yayasan. Pengurus yayasan mempercayakan pengelolaan madrasah kepada madrasah dan komite.

c. Penyusunan dilakukan awal tahun pelajaran

Penyusunan RKAM pada awal tahun memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber penerimaan dan dana yang sudah ada, potensi dana yang akan diterima, dan pengeluaran yang ada pada tahun ajaran sebelumnya, agar dapat selalu menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dengan adanya permasalahan tersebut, MI Ma'arif 03 Karangmangu berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun upaya tersebut memerlukan biaya yang besar. Dengan demikian, pendidikan yang mahal bukan secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan madrasah. Itu berarti bahwa sistem biaya pendidikan merupakan bagian dari

manajemen keuangan madrasah serta merupakan salah satu unsur penentu terwujudnya kualitas pendidikan madrasah.

Penyusunan RKAM pada awal tahun pelajaran memiliki keunggulan yaitu biaya pendidikan madrasah akan disimulasikan dengan rencana kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Selain itu penyusunan RKAM juga mempelajari kelebihan dan kekurangan pelaksanaan RKAM pada tahun ajaran sebelumnya, sehingga akan terwujud manajemen keuangan madrasah yang lebih efektif dan efisien, pada akhirnya cita-cita terwujudnya mutu pendidikan madrasah yang berkualitas.

d. Melakukan pengawasan

Strategi pengawasan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait penggunaan dana pendidikan madrasah. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite, dan bendahara.

e. Alur Penyusunan RKM

Strategi dalam pembiayaan madrasah yaitu penyusunan alur RKAM yang terdiri dari persiapan, perumusan RKM, dan pengesahan RKM. Pada tahap persiapan, kepala madrasah membentuk TPRKM (Tim Penyusun RKM) yang juga bertugas sebagai TPM (Tim Pengembang Madrasah), terdiri dari kepala madrasah, guru, komite, pengurus yayasan, pengawas, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa. Penetapan anggota TPRKM berdasarkan hasil pemilihan/ musyawarah mufakat, selanjutnya dibuat berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala madrasah. Tim perumus RKM terdiri dari pengurus inti, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti dibantu oleh staf pengurus, yaitu anggota yang berasal dari guru dan juga tokoh masyarakat. Anggota tim dibagi tugas sesuai dengan 8 SNP. Kemudian TPRKM ini mengikuti pembekalan mengenai kebijakan-kebijakan dan penyusunan RKM yang difasilitasi oleh kepala madrasah.

Guru dilibatkan dalam penyusunan RKM agar dapat memberikan masukan dan pengajuan kebutuhan dalam proses belajar mengajar, dan tentunya disesuaikan dengan *budget* yang ada. Bendahara (sekaligus guru

yang diberi tugas tambahan) juga dilibatkan terkait administrasi dan pembiayaan. Pada penyusunan RKM/ RKAM diketahui oleh komite dan pengurus yayasan. Bentuk pengawasan komite terhadap keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu adalah atas dasar kepercayaan. Komite percaya bahwa pihak pengelola madrasah mampu menjalankan amanat pendidikan di segala bidang, termasuk pembiayaan. Koordinasi terjalin dengan musyawarah rutin ketika ada sesuatu hal yang perlu dipecahkan bersama. Dalam penyusunan RKM/ RKAM juga diketahui oleh pengurus yayasan. Pengurus yayasan mempercayakan pengelolaan madrasah kepada madrasah dan komite.

Selanjutnya pada tahap perumusan RKM dilakukan langkah-langkah, yakni: pertama, menganalisis kondisi madrasah dengan merumuskan kekuatan dan kelemahan MI Ma'arif 07 Karangmangu dan merumuskan rekomendasi yang tertuang dalam standar SPM dan SNP. Langkah kedua merumuskan sasaran berdasarkan skala prioritas rumusan rekomendasi yang terdapat dalam analisis kondisi madrasah dan merumuskan indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur pencapaian tujuan. Langkah ketiga adalah merumuskan kegiatan dan jadwal kegiatan. Langkah keempat menyusun rencana biaya dan pendanaan.

Tahap terakhir adalah pengesahan RKM. Setelah RKM selesai disusun oleh tim, RKM dibahas bersama oleh kepala madrasah, semua guru, komite madrasah, dan pengurus yayasan sebanyak empat kali rapat untuk dikaji ulang agar RKM yang telah disusun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya RKM diperbaiki dan disahkan oleh kepala madrasah, komite madrasah, pengurus yayasan dan kasi pendidikan madrasah. Akhirnya, RKM yang telah disahkan, disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di MI Ma'arif 07 Karangmangu, biasanya pada rapat wali murid awal tahun pelajaran.

f. Pencarian dana diluar BOS

Strategi lain dapat pembiayaan madrasah di MI Ma'arif 07 Karangmangu yaitu pencarian dana diluar dana BOS. Secara singkat, sumber pendapatan utama adalah dari dana BOS, dan sumber lain dari yayasan Baitul Muttaqin An-Nuur, komite dan donatur. Perolehan dana BOS sesuai dengan jumlah siswa, digunakan untuk kegiatan operasional madrasah. Dana BOS dialokasikan untuk mutu pendidikan, seperti pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pemeliharaan sarana prasarana.⁵⁸ Partisipasi masyarakat sekitar sangat baik dengan mengumpulkan hasil panen setiap tahun sekali yang digunakan untuk kebutuhan madrasah, seperti tenda kemah. Adapun infaq dari wali murid dan donatur khusus untuk pengembangan sarana prasarana. Namun dalam hal administrasi pembiayaan tersendiri dari dana BOS karena pelaporan dan pertanggungjawabannya langsung ke masyarakat.

Dana BOS selama ini belum mencukupi banyaknya kegiatan MI Ma'arif 07 Karangmangu sehingga pihak madrasah menggali dana ke komite untuk meminta bantuan kepada wali peserta didik, guru PNS, masyarakat, dunia usaha/industri. Dana selama ini digunakan untuk pengeluaran KBM / standar proses, standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, sarana dan prasarana, diktendik, penilaian, dan SKL.

Berdasarkan kenyataan dana BOS yang tidak memenuhi seluruh pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu, sehingga perlu adanya strategi pembiayaan melalui kebijakan madrasah. Strategi khusus dalam pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 07 Karangmangu menurut ibu kepala sekolah yaitu melalui gerakan infak dan sedekah peserta didik dan pegawai MI setiap hari selasa dan jumat. Selain itu mencari donatur dan giat memberikan keilmuan kepada masyarakat untuk giat berinfak dan bersedekah untuk kegiatan pendidikan. Kebijakan kepala sekolah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendanaan pembiayaan

⁵⁸ Wawancara dengan Nurul Fadhilah, S.Pd.I selaku Bendahara MI Ma'arif 07 Karangmangu pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 13.00 WIB.

pendidikan yaitu melalui infak tahunan atau uang bangunan, infak guru PNS dan sertifikasi, dan dari pinjaman BMT Ummat. Tingkat efektifitas dan efisiensi Strategi pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan yaitu MI Ma'arif 07 Karangmangu mampu melakukan strategi pembiayaan yang baik tidak mengalami pemborosan dan mampu meningkatkan sarana dan prasarana dengan melakukan pembagunan gedung dan fasilitas belajar mengajar secara berkelanjutan.

g. Melakukan desain anggaran

Berdasarkan pada proses pembuatan anggaran di atas maka anggaran MI Ma'arif 07 Karangmangu menggunakan desain sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning Programing and Budgeting System/ PPBS* atau SP4). Dalam desain ini, anggaran disusun dengan siklus perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, di mana semua itu merupakan satu kesatuan sebagai sistem. Desain ini berorientasi kepada mutu keluaran, di mana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program yang diusulkan.

Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. PPBS adalah desain anggaran yang sering dijumpai dalam pembahasan tentang manajemen pembiayaan. Di sini diterangkan bahwa PPBS adalah teknik sistem-analitik utama yang memungkinkan administrator sekolah untuk mengidentifikasi tujuan, penggambaran program untuk mencapai tujuan, menganalisis alternatif, mengalokasikan sumber daya selama periode waktu tertentu, membandingkan biaya dan efektivitas.

h. Melakukan evaluasi keberhasilan pembiayaan pendidikan

Evaluasi keberhasilan pembiayaan pendidikan madrasah di MI Ma'araif 07 Karangmangu melalui efektivitas penggunaan anggaran yang

terdiri dari siswa, guru dan staf, sarana dan prasarana. Strategi ini sangat penting dilakukan sebagai cerminan keberhasilan manajemen keuangan yang telah dilakukan, dan memperbaiki dikemudian hari.

Kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam kiat-kiat MI Ma'arif 07 Karangmangu dalam pembiayaan pendidikan yaitu melalui:

1) Mengatur keluar masuknya dana pembiayaan

Kegiatan mana yang harus dilakukan atau diundur terlebih dahulu akan mendukung kesetabilan dana pembiayaan. Pertimbangannya yaitu setiap kegiatan pendidikan membutuhkan biaya, sehingga perlu skala prioritas dalam melakukan kegiatan tersebut. Kelebihannya adalah kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan peserta didik, sedangkan kekurangannya tidak setiap kegiatan pihak MI Ma'arif 07 Karangmangu dapat mengikutinya.

2) Mengikutsertakan seluruh warga madrasah dan masyarakat.

Khusus untuk pihak komite sangat berperan dalam kiat-kiat pembiayaan pendidikan di madrasah swasta yaitu untuk penggalangan dana dari berbagai sumber seperti masyarakat, pengusaha, serta melakukan pembangunan sarana prasarana madrasah. Partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga seperti komite madrasah. Komite madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di madrasah.

2. Inovasi madrasah dalam pembiayaan di MI Ma'arif Karangmangu

Cara madrasah memperoleh inovasi dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan yaitu:

1) Rapat

Rapat mencari solusi berupa inovasi dengan melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite. Setelah inovasi terbentuk kepala sekolah bertugas untuk memberikan kebijakan sebagai aturan inovasi tersebut dijalankan. Rapat yang melibatkan berbagai pihak sangat penting dilakukan untuk mengumpulkan ide-ide, pertimbangan, kritikan yang bersifat membangun, sehingga diperoleh inovasi pencarian dana yang inovatif dan mendukung pembiayaan pendidikan madrasah di MI Ma'arif 07 Karangmangu.

2) Mendirikan kantin, koperasi, pencarian dana kerjasama dengan Jadi Baru, Kadar Budi, Toko Mas Adil, dan dr. Eko.

Tingkat keberhasilan inovasi tersebut cukup berhasil untuk memenuhi kekurangan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang vital dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Berkenaan dengan sekolah swasta seperti MI Ma'arif 07 Karangmangu, karena status kemandiriannya sekolah swasta tidak terlalu tergantung dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan di yayasan bersifat mandiri. Namun demikian, dukungan dana dari pemerintah tentu sangat besar artinya bagi sekolah-sekolah swasta, asal kebijakan tersebut adil dalam implementasinya.

Sekolah-sekolah swasta dengan segala keterbatasannya berusaha mencukupi kebutuhan operasional sekolah, mulai dari gaji, sarana-prasarana, biaya operasional hingga biaya investasi lainnya. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah seperti BOS hendaknya benar-benar mendukung kehidupan sekolah swasta, bukan mematikannya. Di luar itu semua lembaga swasta perlu berusaha keras menggali sumber dana demi kelangsungan dan perkembangan karya di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan pemberdayaan perlu dilakukan untuk tercapainya "kecukupan" dan "kelimpahan" dalam pembiayaan pendidikan.

a. Sumber-Sumber Pembiayaan di MI Ma'arif 07 Karangmangu

Sumber-sumber keuangan pada suatu sekolah/sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu dari Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, orang tua atau peserta didik, Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Di MI Ma'arif 07 Karangmangu sumber-sumber pembiayaan pendidikan madrasah yaitu Bantuan Operasional Sekolah, Sumbangan dari wali murid, donatur, guru-guru PNS, yayasan dan dari dunia usaha. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh kepala madrasah. Sumber-sumber pendapatan di MI Ma'arif 07 selain dari BOS juga dari sumbangan wali murid yang dikelola komite, sawah wakaf, donatur tetap, yayasan, pamal jariyah setiap Jum'at, para guru PNS dan dunia usaha. Jika hanya mengandalkan dana BOS tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan madrasah apalagi untuk pemenuhan sarana dan prasarana terutama pengadaan gedung dan bangunan oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan terutama wali murid.

Hal senada juga diungkapkan oleh bendahara MI Ma,arif 07 Karangmangu. BOS tidak bisa mencukupi kebutuhan madrasah perlu adanya dana yang bersumber dari masyarakat dikarenakan banyaknya guru swasta, kegiatan madrasah pemenuhan sarana dan prasarana. Apalagi sekarang sedang pembangunan gedung lantai dua. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak adanya peran serta masyarakat dalam mendukung madrasah khususnya MI Ma'arif 07 Karangmangu.

Selain berupa dana atau uang sumber pendapatan madrasah juga dari sumbangan wali murid yang berupa hasil bumi berupa beras. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Madrasah. Sumbangan wali murid tidak hanya berbentuk uang ada juga yang berbentuk hasil bertani yaitu beras sebesar kurang lebih 2 kg per murid.

Siswa MI Ma'arif 07 Karangmangu yang begitu banyak sehingga perlu adanya pengadaan gedung dan bangunan. Dalam pembangunan gedung dan sarana prasana selain dari bantuan pemerintah juga dari bantuan wali murid, yayasan maupun dari para donatur. Hal ini diungkapkan oleh

komite madrasah. Jarang sekali MI Ma'arif 07 Karangmangu mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya tahun 2015 kemarin. Itupun tidak mencukupi kebutuhan untuk pembangunan gedung apalagi untuk gedung lantai dua. Berkat sumbangan dari wali murid gedung barupun bisa berdiri kokoh. Dan sekarang sedang mendirikan gedung berlantai dua itupun bersumber dari wali murid, yayasan dan masyarakat. Memang kesadaran masyarakat terhadap madrasah di lingkungan kami sangat mendukung.

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Berkenaan dengan sekolah swasta seperti MI Ma'arif 07 Karangmangu, karena status kemandiriannya sekolah swasta tidak terlalu tergantung dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan di yayasan bersifat mandiri. Namun demikian, dukungan dana dari pemerintah, wali peserta didik, dunia usaha dan masyarakat. tentu sangat besar artinya bagi sekolah-sekolah swasta, khususnya MI Ma'arif 07 Karangmangu.

c. Strategi Pembiayaan Pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari

1. Kiat-Kiat Pembiayaan Pendidikan

MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap memiliki strategi khusus dalam pembiayaan pendidikan yaitu:

a. Penyusunan RKM

Menyusun RKM menjadi langkah awal dalam strategi pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang lebih dikenal dengan RKAM adalah merupakan hal penting dalam tahap pengelolaan keuangan madrasah, dimana sebuah pengelolaan keuangan akan dapat berjalan dengan baik apabila mempunyai dasar perencanaan yang baik pula. Akhir-akhir ini RKAM juga merupakan salah satu syarat diterimanya usulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kemenag RI.

Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang ditindaklanjuti Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didalamnya memuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), baru tersusun untuk tahun pertama. Diharapkan setelah masuk tahun kedua, Tim Pengembang Madrasah segera menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk tahun kedua. Pengembangan tujuan Madrasah untuk empat tahun kedepan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian perlu memadukan kondisi Madrasah awal tahun penyusun RKM dengan visi dan misi Madrasah .

b. Infak siswa yang sama rata

Aturan mengenai pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada 28 Juni 2012. Peraturan itu sekaligus mengganti Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

Beban terberat sekolah swasta seperti MI Maarif 03 Gentasi umumnya adalah komponen gaji guru. Hal inilah yang membuat biaya operasional sekolah swasta dan negeri sangat berbeda. Sumbangan dari murid itu akan menutup kebutuhan dana operasional sekolah yang tidak bisa dibiayai sepenuhnya oleh BOS.

Pemerintah juga memperbolehkan sekolah swasta seperti MI Maarif 03 Gentasi menerima sumbangan dari masyarakat pada awal penerimaan siswa. Tapi sekolah harus menjamin bahwa sumbangan tersebut tidak mempengaruhi prioritas penerimaan siswa maupun penilaian siswa, aturan yang memperbolehkan pungutan tersebut tidak berlaku bagi sekolah negeri.

Besarnya tarikan yang sama rata akan dirasa adil dan tidak mempengaruhi perhatian sekolah terhadap latar belakang ekonomi keluarga siswa. Selain itu sekolah dapat dengan mudah memprediksi pendapatan dana pendidikan yang diperoleh dari tarikan bulanan, dan tahunan dan mempermudah manajemen keuangan pendidikan madrasah. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan MI Maarif 03 Gentasi meminimalisir ketimpangan sosial antara siswa, serta salah satu strategi pembiayaan pendidikan madrasah yang sudah berjalan dengan baik.

- c. RKM disusun tiap awal Januari dengan melibatkan kepala madrasah, guru, komite, dan bendahara

Penyusunan RKM di MI 03 Gentasri dilakukan awal tahun kalender umum yaitu pada bulan Januari. Hal ini karena pengelolaan manajemen keuangan dilakukan penutupan pada bulan Desember pada tahun sebelumnya. Tim yang terlibat bekerjasama dengan kepala madrasah dan komite untuk bermusyawarah. Tim yang terlibat dalam penyusunan RKM yaitu bendahara, kepala madrasah, dewan guru, dan komite madrasah dengan tugas bendahara menyusun, kepala sekolah dan komite mengecek dan menyetujui. Sumber dana dalam penyusunan RKM yaitu dari BOS yang digunakan untuk membeli buku pelajaran, PTS dan PAS, alat tulis dan lain sebagainya. Selama ini sumber dana dari BOS tidak mencukupi seluruh kegiatan madrasah, sehingga pihak madrasah menarik infak kepada walimurid melalui kartu infak.

Dalam penyusunan RKAM dengan guru juga dilibatkan untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan masukan terkait pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan, pihak guru juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan anggaran dana pendidikan dari tiap-tiap guru Pihak lain yang terlibat dalam penyusunan RKAM yaitu komite madrasah. Pihak komite bertugas untuk mengawasi keluar masuknya keuangan dalam pembiayaan pendidikan dengan cara melakukan pengawasan secara periodik baik itu semester maupun tahunan.

d. Membuat alur penyusunan RKM

Proses penyusunan RKM melalui tiga jenjang, yaitu persiapan, penyusunan RKM dan pengesahan RKM. Pada tahap persiapan, kepala madrasah membentuk TPRKM (Tim Penyusun RKM) yang juga bertugas sebagai TPM (Tim Pengembang Madrasah), terdiri dari kepala madrasah, guru, komite, pengurus yayasan, pengawas, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa. Penetapan anggota TPRKM berdasarkan hasil pemilihan/ musyawarah mufakat, selanjutnya dibuat berita acara dan surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala madrasah. Tim perumus RKM terdiri dari pengurus inti, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus inti dibantu oleh staf pengurus, yaitu anggota yang berasal dari guru dan juga tokoh masyarakat. Anggota tim dibagi tugas sesuai dengan 8 SNP. Kemudian TPRKM ini mengikuti pembekalan mengenai kebijakan-kebijakan dan penyusunan RKM yang difasilitasi oleh kepala madrasah.

e. Membuat Desain Anggaran

Anggaran MI Ma'arif 03 Gentasari menggunakan desain sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*Planning Programing and Budgeting System/ PPBS* atau SP4). Dalam desain ini, anggaran disusun dengan siklus perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, di mana semua itu merupakan satu kesatuan sebagai sistem. Desain ini berorientasi kepada mutu keluaran, di mana anggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program yang diusulkan.

Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. PPBS adalah desain anggaran yang sering dijumpai dalam pembahasan tentang manajemen pembiayaan. Di sini diterangkan bahwa PPBS adalah teknik sistem-analisis utama yang

memungkinkan administrator sekolah untuk mengidentifikasi tujuan, penggambaran program untuk mencapai tujuan, menganalisis alternatif, mengalokasikan sumber daya selama periode waktu tertentu, membandingkan biaya dan efektivitas.

f. Melakukan evaluasi efektivitas anggaran

Evaluasi keberhasilan pembiayaan pendidikan madrasah di MI Ma'arif 03 Gentasari melalui efektivitas penggunaan anggaran yang terdiri dari siswa, guru dan staf, sarana dan prasarana. Strategi ini sangat penting dilakukan sebagai cerminan keberhasilan manajemen keuangan yang telah dilakukan, dan memperbaiki dikemudian hari.

Zakat, infak, sadakah dan wakaf (siswa) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika madrasah mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggunakan siswa sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang dibingkai dalam pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang berkualitas bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (siswa) bisa menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini.

MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui siswa, masyarakat dan kalangan usaha sudah dilakukan. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, komite, guru, dan ketua yayasan. Kiat-kiat khususnya yaitu melakukan pendataan sumber-sumber dana yang potensial, agar bisa memenuhi pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Pendataan sumber-sumber dana dari berbagai pihak dapat memudahkan kerja komite untuk melakukan pendekatan terhadap target sumber pembiayaan melalui proposal pembiayaan pendidikan madrasah. Kelebihan kiat-kiat MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui pendataan masyarakat yang potensial menjadi donatur tetap maupun tidak tetap yaitu memudahkan arah kerja pihak madrasah dalam mencari dana pembiayaan pendidikan.

Masyarakat potensial yang didata biasanya unit usaha yang pernah atau rutin memberikan sumbangan kepada madrasah, masyarakat yang dipandang berada dan pihak-pihak sponsor yang pernah bekerjasama dengan MI Ma'arif 03 Gentasari. Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya.

Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi masyarakat, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

2. Inovasi madrasah dalam pembiayaan d MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika *performance* sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Paradigma umum pembiayaan pendidikan menekankan pada penyelesaian biaya rendah untuk meningkatkan efisiensi internal dan efisiensi eksternal sistem pendidikan pada jenjang sekolah yang berbeda.

Di era globalisasi ini pembiayaan pendidikan, khususnya bagi lembaga swasta seperti MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap harus menjadi perhatian serius demi upaya mengembangkan kualitas pendidikan. Diperlukan inovasi-inovasi khusus dalam penggalangan dan penggalian dana demi kelangsungan dan perkembangan lembaga swasta, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Inovasi yang telah dilakukan madrasah dalam mencari sumber-sumber biaya pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yaitu dengan cara mencari informasi terkait dana dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, maupun sumber

dana dari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi warga yang dianggap mampu memberikan donatur ke madrasah atau wirausaha yang ada di lingkungan madrasah.

Inovasi tersebut menggunakan prinsip jemput bola, pihak madrasah melakukan pendataan pihak-pihak yang berpotensi akan memberikan donatur, selanjutnya pihak madrasah akan melakukan kunjungan dengan membawa proposal pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Langkah ini cukup berhasil dengan tingkat keberhasilan 60%. Kelebihan inovasi jemput bola berpotensi memperoleh sumber dana yang lebih banyak, karena madrasah aktif mencari dana pendidikan. Namun kelemahannya, pihak madrasah kurang efisien dalam mencari sumber dana, karena banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendatangi satu persatu sumber dana yang potensial. Selain itu banyak memperoleh penolakan, serta orang yang didatangi belum tentu ikhlas memberikan dananya.

3. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Zakat, infak, sadakah dan wakaf (siswa) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika madrasah mampu secara kreatif, transparan dan akuntabel menggunakan wali siswa sebagai sumber-sumber biaya pendidikan yang kaya, melimpah, dan tersedia secara berkesinambungan, yang dibingkai dalam pelaksanaan seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang berkualitas bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat (siswa) bisa menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini. Sumber-sumber pembiayaan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam

memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui wali siswa, yayasan, masyarakat dan kalangan usaha sudah dilakukan. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, komite, guru, dan ketua yayasan. Kiat-kiat khususnya yaitu melakukan pendataan sumber-sumber dana yang potensial, agar bisa memenuhi pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara Negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenej pembiayaannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Pendataan sumber-sumber dana dari berbagai pihak dapat memudahkan kerja komite untuk melakukan pendekatan terhadap target sumber pembiayaan melalui proposal pembiayaan pendidikan madrasah. Yaitu dengan mencari sumber-sumber pendanaan terlebih dahulu diadakan pendataan diantaranya pendataan wali murid, para donatur, masyarakat dan dunia usaha untuk memudahkan melakukan pendekatan terhadap para donatur.

kiat-kiat MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam memaksimalkan pembiayaan pendidikan melalui pendataan masyarakat yang potensial menjadi donatur tetap maupun tidak tetap yaitu

memudahkan arah kerja pihak madrasah dalam mencari dana pembiayaan pendidikan.

Masyarakat potensial yang didata biasanya unit usaha yang pernah atau rutin memberikan sumbangan kepada madrasah, masyarakat yang dipandang berada dan pihak-pihak sponsor yang pernah bekerjasama dengan MI Ma'arif 03 Gentasari. Membangun madrasah bermutu merupakan tanggungjawab kita sebagai warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi masyarakat, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Begitupun juga di MI Ma'arif 03 Gentasari, semua komponen terlibat dalam pembiayaan pendidikan untuk mencapai visi dan misi dari madrasah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Dari pembahasan penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa:

1. Kiat-kiat pembiayaan pendidikan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap secara prinsip sama yaitu a. Langkah awal yaitu dengan menyusun RKM/RKAM, b. penyusunannya melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah, c. menggunakan alur penyusunan RKM yang terdiri dari persiapan, perumusan RKM, dan pengesahan RKM, d. mencari dana diluar dana BOS yaitu bekerjasama dengan siswa atau walimurid, dan masyarakat, e. membuat desain anggaran, dan f. melakukan evaluasi keberhasilan pembiayaan pendidikan. Perbedaannya yaitu waktu penyusunan RKM yang berbeda pada MI Maarif 07 Karangmangu penyusunan RKM dilakukan awal tahun kalender akademik yaitu awal siswa masuk sekolah, sedangkan MI Ma'arif 03 Gentasri disusun awal tahun kalender umum yaitu awal Januari. Kiat-kiat madrasah dalam pembiayaan yang dilakukan yaitu mengatur keluar masuknya dana pembiayaan, mengikutsertakan seluruh warga madrasah dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sekolah untuk pembiayaan pendidikan.
2. Inovasi madrasah dalam pembiayaan di MI Ma'rif 07 Karangmangu dan MI Ma'arif 03 pada prinsipnya sama yaitu melalui rapat kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite mencari solusi dan inovasi terkait pembiayaan pendidikan. Inovasi terkait dengan pembiayaan salah satunya adalah mendirikan Kantin dan Koperasi Madrasah.
3. Adapun sumber-sumber pembiayaan MI Ma'arif 07 Karangmangu maupun di MI Ma'arif 03 Gentasari yaitu dari BOS, sumbangan wali murid pertahun, murid, tanah wakaf berupa sawah, yayasan, guru PNS, donatur tetap/tidak tetap dan masyarakat.

B. Rekomendasi

1. MI Ma'arif 07 Karangmangu

Strategi pembiayaan pendidikan, madrasah ini sudah mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Tugas ini diampu oleh guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara. Alangkah lebih baik jika madrasah mengangkat staf khusus yang menangani administrasi dan pembiayaan agar tugas guru menjadi tidak terganggu. Mengingat 67% guru adalah non PNS dan juga tugas guru yang semakin berat saat ini, yaitu membentuk pribadi yang berkarakter. Hal ini membutuhkan porsi waktu, tenaga, dan pemikiran bagi guru untuk mewujudkannya. Jika guru dibebani tugas tambahan, maka tidak fokus pada pekerjaannya. Jika ada staf khusus, maka masalah administrasi dan pembiayaan akan berjalan lancar, kegiatan guru pun juga berjalan lancar, sehingga lebih efektif.

Dari segi kiat-kiat dan inovasi dalam pembiayaan pendidikan pendapatan sudah sangat bagus, madrasah ini didukung penuh oleh masyarakat sekitar dengan sumbangan dana yang cukup besar. Hal ini sudah sesuai peraturan bahwa madrasah boleh melakukan penggalangan dana dari masyarakat, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, alangkah lebih baiknya jika pendapatan dari masyarakat dimasukkan ke dalam anggaran/RKAM agar lebih jelas dan transparan. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan kepada madrasah lewat komite maupun yayasan. Pihak madrasah tidak perlu khawatir akan tuduhan-tuduhan negatif nantinya, asalkan pertanggungjawabannya sesuai dan transparan. Justru hal itu akan lebih menguntungkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

2. MI Ma'arif 03 Gentasari

Dari segi strategi pembiayaan pendidikan, madrasah ini sudah cukup mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Tugas ini diampu oleh guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara. Sama dengan MI Ma'arif 07 Karangmangu, alangkah lebih baik jika madrasah mengangkat staf khusus yang

menangani administrasi dan pembiayaan agar tugas guru menjadi tidak terganggu. Jika guru dibebani tugas tambahan, maka tidak fokus pada pekerjaannya. Jika ada staf khusus, maka masalah administrasi dan pembiayaan akan berjalan lancar, kegiatan guru pun juga berjalan lancar, sehingga lebih efektif.

Dari segi kiat-kiat dan inovasi madrasah ini masih kurang, karena madrasah ini kurang didukung oleh masyarakat sekitar. Madrasah harus lebih giat menggalang dana dari masyarakat dengan menggandeng komite maupun pengurus yayasan. Lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat agar mereka antusias, seperti: pawai ta'aruf, drumband, persami, dan lain sebagainya. Kemudian dana masyarakat yang telah masuk, alangkah lebih baiknya ke dalam RKAM agar lebih jelas dan transparan. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan penggunaan dana yang telah mereka sumbangkan kepada madrasah lewat komite maupun yayasan. Pihak madrasah tidak perlu khawatir akan tuduhan-tuduhan negatif nantinya, asalkan pertanggungjawabannya sesuai dan transparan. Justru hal itu akan lebih menguntungkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengungkap lebih dalam tentang strategi pembiayaan pendidikan dari sumber yang lebih khusus, seperti anggaran BOS, anggaran DIPA (bagi madrasah negeri), atau anggaran bantuan komite agar hasil penelitian lebih fokus.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan kelengkapan penulisan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi praktisi pendidikan maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Daftar Pustaka

- Ahmad Izzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan* (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012)
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984)
- Akdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Bambang Ismaya, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf, 1998)
- Dirjen Pendis Kemenag RI, *Petunjuk Teknis BOS Pada Madrasah*, Tahun 2016
- E. Koswara, *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif*. <http://koswaraero.blogspot.com>. Diakses tanggal 29 Mei 2016.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Edward Sallis. *Total Quality Management In Education*, Jogjakarta:IRCiSoD, 2012.
- Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Hadori Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1996
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- <http://cilacap.kemenag.go.id/berita/read/100-pengelola-bos-madrasah-ikuti-sosialisasi> diakses tanggal 30 Mei 2016
- Indra Bastian. *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga , 2006
- I Wayan AS, *8 Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: Azzahra, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line diakses di <https://kbbi.web.id/kiat-2> pada tanggal 22 November 2018 pukul 21.30 WIB

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014

Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014)

Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Terj.), (Jakarta: UI Press, 1992)

M. Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007

Mahfudh Shalahudin,dkk, *Metodologi Pendidikan Agama* (Surabaya:Bina Ilmu, 1987)

Mochammad Idhochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004)

Muhaimin, "*Manajemen Pendidikan*" *Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

Muhammad Anis, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran*, 2015

Muh. Hizbul Muflihini, *Administrasi Pendidikan: Tinjauan Teori Untuk Praktek Manajerial Bagi Guru dan Pimpinan Sekolah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013)

Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Reamaja Rosda Karya. 2006.

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group. 2010.

Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung:Rosdakarya, 2012

Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Nurhadi, *Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2005)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), 8

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

T. Hani Handoko, MBA., *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003)

Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)

Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006)

Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif 07 Karangmangu Siti Nur Aliyah,S.Pd.I, Kamis, 22 September 2016, Jam 08.30 WIB

Wawancara dengan Kepala MI Ma'arif 03 Gentasari ,Ibnu Tamyis,S.Ag Sabtu, 11 Agustus 2016, Jam 11.10 WIB

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran (Teoritik dan Praktik Kurikulum KTSP)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka, 1993)

Yatim Riyatno, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001)

Zaenal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda, 2010)

